

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Kajian Strategi Kebijakan Pelestarian Budaya untuk Memperkuat Interaksi Budaya Di Kota Yogyakarta ini dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan gambaran dan analisis terkait kebijakan pelestarian budaya guna memperkuat interaksi budaya di Kota Yogyakarta.

Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh DPRD Kota Yogyakarta atau pengembangan penelitian lebih lanjut.

Oleh karena itu, semoga laporan ini dapat menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami ucapkan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kepada Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2025
Tim Penyusun

CV. Lembaga Strategi Nasional

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 Judul Penelitian : Kajian tentang Strategi Kebijakan Pelestarian Budaya Untuk Memperkuat Interaksi Sosial di Kota Yogyakarta
- 2 Ketua Peneliti
a. Nama : Willy Alfarius, S.Sej., M.A
b. Perusahaan : CV. Lembaga Strategi Nasional
- 3 Anggota Tim Peneliti : 3 (Tiga) Orang
a. Jumlah : 1. Dr.Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A.
b. Nama : 2. Rendra Agusta, S.Psi.,M.Psi.
3. Nursamsiyah, S.I.P.
- 4 Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta
- 5 Lama Penelitian : 60 (enam puluh lima) Hari
- 6 Biaya penelitian Besar Dana : Rp. 93.687.052,00,-
: (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh dua Rupiah).
- Sumber Dana : APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025

Yogyakarta, 2025

Mengetahui,
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA,
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA
YOGYAKARTA
SELAKU “**PENGGUNA ANGGARAN**”

Menyetujui,
CV. LEMBAGA STRATEGI
NASIONAL

Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.I.P.
NIP. 197106301996031003

Syarief Aryfaid, S.IP.,M.I.P.
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Kajian.....	4
1.4 Sasaran dan Manfaat Kajian	4
1.5 Dasar Hukum.....	5
1.6 Metode Kajian.....	5
1.7 Jenis dan Pendekatan Kajian	6
1.8 Teknik Pengumpulan Data	6
1.9 Teknik Analisis Data	7
1.10 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN KONTEKS SOSIAL- BUDAYA	9
2.1. Profil Demografi dan Migrasi Penduduk.....	9
2.2. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat.....	17
2.3. Perkembangan Kawasan Budaya dan Ruang Interaksi	18
2.4. Tantangan Sosial Budaya di Era Multikultural dan Modernisasi.....	20
BAB III DINAMIKA INTERAKSI BUDAYA DI KOTA YOGYAKARTA.....	23
3.1. Bentuk dan Pola Interaksi antara Masyarakat Lokal dan Pendatang	23
3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Budaya	27
3.3. Potensi Konflik dan Ketegangan Budaya.....	31
3.4. Praktik Baik dan Inisiatif Lokal dalam Membangun Dialog Budaya.....	41
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH.....	44
4.1. Tinjauan atas Kebijakan yang Ada.....	44

4.2. Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan	45
4.3. Peran Pemerintah Daerah, Lembaga Budaya, dan Masyarakat	48
4.4. Gap Analisis antara Kebutuhan dan Respons Kebijakan	52
BAB V STRATEGI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	56
5.1. Strategi Penguatan Interaksi Budaya yang Inklusif	56
5.2. Rekomendasi Program/Kegiatan Prioritas	57
1) Jelajah Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Heritage)	58
2) Gelar Budaya Nusantara.....	60
3) Inventarisasi dan Basis Data IKPMD	61
4) Lokakarya Penulisan Sejarah Perantau Daerah di Yogyakarta	63
5) Museum Pendidikan Tinggi.....	66
5.3. Rancangan Model Kebijakan atau Intervensi Sosial-Budaya	68
1) Jelajah Budaya Mataram Islam.....	69
2) Tur Sumbu Filosofis	70
3) Gelar Budaya Nusantara.....	71
4) Inventarisasi Ikatan Mahasiswa Daerah	73
5) Lokakarya Penulisan Sejarah Perantau.....	74
6) Museum Pendidikan Tinggi.....	75
5.4. Indikator Keberhasilan dan Rencana Tindak Lanjut	76
1) Ragam Partisipan	76
2) Sebaran Partisipan	77
3) Respons Partisipan.....	77
4) Jangkauan di Media Sosial.....	78
BAB VI PENUTUP	80
6.1. Kesimpulan.....	80
6.2. Implikasi Kebijakan.....	81
6.3. Keterbatasan Kajian dan Saran untuk Penelitian Lanjutan	82
6.4. Rekomendasi Strategis	83
1. Penguatan Kebijakan Inklusif Berbasis Multikulturalisme	83
2. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Literasi Toleransi.....	83
3. Fasilitasi Ruang Interaksi Budaya yang Berkeadilan	83

4. Pencegahan dan Penanganan Konflik Budaya Berbasis Komunitas.....	83
5. Revitalisasi Kelembagaan Budaya Lokal dan Keterlibatan Komunitas Pemandang.....	84
6. Penyusunan Indikator Kinerja Interaksi Budaya	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta pada 2020.....	16
---	----

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Gambar Keraton Kasultanan Yogyakarta sebagai pusat dari peradaban sekaligus jantung bagi kebudayaan Jawa. Di sinilah kemudian apa yang disebut sebagai Kota Yogyakarta lahir sebagai sebuah kotapraja di masa kemerdekaan Indonesia.9
- Gambar 2. 2 Gambar Kampung Ketandan yang terletak di Kawasan Malioboro menjadi bukti bagaimana kehidupan multikultur yang ada di Kota Yogyakarta telah berlangsung selama beberapa abad lamanya. ..10
- Gambar 2. 3 Gambar Kawasan Kotabaru yang pada masa kolonial sekitar awal abad ke-20 menjadi permukiman bagi kelompok Eropa, selain juga Benteng Vredenburg yang pada masa sebelumnya juga menjadi tempat tinggal bagi kaum kulit putih.....12
- Gambar 2. 4 Gambar Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang sedang dilantik oleh Presiden Sukarno ketika Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia sepanjang 1946 hingga 1949.13
- Gambar 2. 5 Gambar Kampus Universitas Gadjah Mada saat masih menempati kompleks Keraton Yogyakarta dalam dekade 1950-an hingga 1960-an, yang mana mahasiswa kampus ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.14
- Gambar 2. 6 Gambar Pasar Beringharjo yang terletak di sebelah selatan kawasan Malioboro. Sejak masa kolonial, Kota Yogyakarta telah memiliki daya tariknya tersendiri yang menyebabkan arus besar migrasi dari berbagai daerah terus menerus memenuhi kota ini pasca Indonesia merdeka..... 15
- Gambar 3. 1 Gambar Bakpia sebagai makanan hasil proses akulturasi antara kebudayaan Tionghoa dan Indonesia. Kini menjadi makanan khas sekaligus ikon Yogyakarta.24
- Gambar 3. 2 Gambar Prajurit Bugisan sebagai salah satu pasukan Keraton Yogyakarta yang dahulu adalah orang-orang Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan.....25
- Gambar 3. 3 Gambar Prajurit Dhaengan sebagai salah satu pasukan Keraton Yogyakarta yang dahulu adalah orang-orang Makassara yang berasal dari Sulawesi Selatan.....25
- Gambar 3. 4 Gambar Upacara Garebeg yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Kasultanan Yogyakarta, yang mana upacara tersebut kental dengan nuansa akulturasi budaya, terutama dari gunung yang diberikan oleh Sultan kepada rakyatnya tersebut.....26
- Gambar 3. 5 Gambar Tamansari yang menjadi tempat pemandian sekaligus taman air milik Keraton Kasultanan Yogyakarta. Arsitektur

	Tamansari mengadopsi gaya Eropa, dirancang oleh seorang arsitek asal Portugis.....	27
Gambar 3. 6	Gambar Berita mengenai konflik antar etnis yaitu Madura versus Papua yang sempat menghebohkan warga Yogyakarta pada Februari 2025 lalu.	32
Gambar 3. 7	Gambar Cuplikan berita yang mengabarkan tentang pengepungan mahasiswa Papua di asrama mereka oleh sekelompok orang yang terjadi di Asrama Kamasan, Yogyakarta pada 2016.	35
Gambar 4. 1	Gambar Penyelenggaraan Kotabaru Heritage Film Festival 2024 yang berusaha untuk mengakomodasi berbagai macam latar belakang kultur di Indonesia ke dalam medium film.	46
Gambar 4. 2	Gambar Rintisan Kelurahan Budaya di Kelurahan Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta. Rintisan Kelurahan Budaya ini nantinya dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan Jawa di tengah situasi modernisasi dan globalisasi seperti sekarang.....	47
Gambar 4. 3	Gambar Perhelatan Jogja Cross Culture yang diselenggarakan di Jalan Malioboro, Yogyakarta pada 25 Mei 2024 sebagai salah satu program andalan dalam pengembangan kebudayaan di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.	49
Gambar 4. 4	Gambar Perhelatan Festival Ketoprak Yogyakarta yang mengambil lakon sejarah Kerajaan Mataram yang dipentaskan pada 2022 lalu. Festival ini adalah salah satu program di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk terus melestarikan kebudayaan panggung khas Yogyakarta, dengan melibatkan tiap kemantren untuk tampil sebagai peserta.....	50
Gambar 4. 5	Gambar Program Kampung Menari menjadi salah satu program andalan dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Gambar di atas menunjukkan pelaksanaan Kampung Menari yang digelar di Embung Giwangan pada 9 Juni 2024 lalu.....	52
Gambar 4. 6	Gambar Masjid Gedhe Kauman beserta Kampung Kauman di sisi belakangnya yang menjadi salah satu kawasan bernilai historis yang menjadi saksi bagi jalannya sejarah Kota Yogyakarta. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan pengembangan kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta.	54
Gambar 5. 1	Gambar Herman Johannes, seorang perantau asal Timor yang kemudian menjadi guru besar sekaligus Rektor Kedua Universitas Gadjah Mada. Ia hanya satu dari sekian banyak para pelajar dan mahasiswa perantau yang sukses menorehkan pencapaian terbaik untuk kemajuan bangsa.	65

- Gambar 5. 2 Gambar Beberapa museum milik kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Museum kampus ini kemudian dapat menjadi prototipe bagi Museum Pendidikan Tinggi yang nantinya akan dapat lebih komprehensif dan lengkap.68
- Gambar 5. 3 Gambar Pintu masuk Makam Raja-raja Mataram di Kotagede, Yogyakarta. Kawasan ini merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada sekitar abad ke-16 sebelum akhirnya pecah menjadi dua kerajaan.70
- Gambar 5. 4 Gambar Tugu Yogyakarta yang menjadi salah satu dari bagian Sumbu Filosofi Yogyakarta, selain Gunung Merapi, Keraton, dan Panggung Krapyak.71
- Gambar 5. 5 Gambar Penyelenggaraan Festival Sastra Yogyakarta yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini dapat menjadi salah satu percontohan bagi penyelenggaraan Gelar Budaya Nusantara yang nantinya akan lebih beragam dalam hal asal daerah untuk konten-konten acara yang dihadirkan, yang dapat melibatkan partisipasi aktif para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. .73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai kota yang memiliki sejarah panjang sejak abad ke-18 seiring dengan berdirinya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kota Yogyakarta sudah sejak periode itu menjadi kota yang ramai didatangi berbagai pelancong dari luar daerah. Pembukaan perkebunan-perkebunan milik pemodal swasta Eropa sejak pertengahan abad ke-19 menjadikan kota ini semakin riuh. Bahkan sebuah kawasan permukiman khusus untuk orang-orang Eropa dibangun tidak jauh dari keraton yang kemudian dikenal sebagai kawasan Kotabaru (Farabi Fakhri 2015:159-164). Kondisi ramai dan semakin heterogennya Kota Yogyakarta meningkat pesat ketika Indonesia merdeka pada 1945. Tidak berselang lama, oleh karena situasi politik dan keamanan yang saat itu tidak menentu, Yogyakarta dijadikan sebagai ibukota Republik Indonesia sepanjang 1946 hingga 1949.

Sejarah panjang Kota Yogyakarta yang tidak pernah lepas dari keberadaan masyarakat yang beragam dan berasal dari berbagai latar belakang etnis maupun bangsa menjadikan kota ini sebagai kota yang cukup heterogen. Terutama setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta kemudian mencatatkan diri sebagai kota tempat universitas nasional pertama berdiri, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1949. Dalam tahun-tahun berikutnya, berbagai perguruan tinggi terus menerus bermunculan. Hal ini sejurus dengan semakin berdatangnya para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia untuk menimba ilmu di Kota Yogyakarta. Julukan “Kota Pelajar” yang disematkan pada Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa di kota inilah berbagai kampus berdiri dengan jumlah mahasiswa yang semakin tahun semakin meningkat.

Selain dikenal sebagai Kota Pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Budaya dan Pariwisata. Di masa Indonesia merdeka, Yogyakarta tumbuh menjadi salah satu kota favorit tujuan wisata para pelancong dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Bahkan sudah sejak masa kolonial Yogyakarta diproyeksikan sebagai daerah tujuan wisata oleh pemerintah kolonial (Hasbi

Marwahid 2022:106-107). Pertumbuhan pesat pariwisata di kota ini juga kemudian mengundang para pekerja dari luar Yogyakarta. Mereka merantau dari daerah asalnya untuk mencari penghidupan yang layak di kota ini yang nyaris setiap hari tidak pernah sepi dari wisatawan. Rata-rata mereka bekerja di sektor informal, mulai dari pekerja di sektor perdagangan, jasa, sampai membuka usaha di kawasan yang ramai didatangi turis.

Hanya saja, tidak dapat dimungkiri bahwa semakin banyaknya pendatang dari luar daerah yang tinggal di Yogyakarta, baik untuk waktu sementara (berkuliah dan bersekolah) maupun menetap (bekerja atau membuka usaha), telah menimbulkan suatu fenomena sosial yang spesifik. Di satu sisi, Yogyakarta sebagai salah satu jantung dari kebudayaan Jawa, memiliki suatu adat istiadat, norma, tradisi, dan budaya yang sangat khas yang sehari-harinya hidup dan dihidupi oleh masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Sementara di sisi lain, masyarakat yang berlatar belakang pendatang tentu juga telah memiliki adat istiadat, norma, tradisi, dan budaya masing-masing yang berasal dari daerah mereka sendiri. Potensi munculnya konflik atau ketegangan berbasis budaya dan identitas menjadi salah satu ancaman yang sudah semestinya diantisipasi oleh para pemangku kebijakan maupun elemen masyarakat itu sendiri. Stereotipe dan prasangka menjadi sesuatu yang kemudian kerap tumbuh di antara masyarakat yang beragam latar belakang etnis, kultur, dan budayanya ini (Dewi Novianti dan Sigit Tripambudi 2014:126-131).

Selain masalah konflik berbasis identitas budaya, permasalahan lain yang disebabkan oleh keberagaman budaya sebagai dampak dari masifnya pendatang dari luar Yogyakarta juga turut mengintai. Misalnya saja, isu mengenai komersialisasi budaya, gentrifikasi, perubahan tata ruang, aspirasi dan representasi dalam kebijakan publik, konflik nilai dan gaya hidup, hingga segregasi sosial menjadi beberapa hal yang mesti diantisipasi dan diatasi (Winda Ayu Putri 2024:189-193). Hal-hal ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan perlahan sudah mulai terjadi beberapa kali dalam tempo setidaknya sejak 20 tahun terakhir.

Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tinggal diam dalam menyikapi fenomena perubahan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat yang semakin heterogen.

Pendekatan budaya adalah salah satu langkah yang diambil guna mencegah maupun menyelesaikan problem sosial budaya yang ada. Melalui Dinas Kebudayaan, berbagai macam program dibentuk dan dijalankan guna mendorong interaksi antar budaya yang lebih masif dan harmonis.

Tentu saja tidak semua program yang dijalankan melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta hanya berfokus pada masalah interaksi antar budaya saja. Penguatan terhadap budaya lokal Yogyakarta sendiri menjadi prioritas utama. Maka dari itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang kemudian dapat berjalan beriringan. Di satu sisi, kebijakan dan program turunannya dilakukan guna melestarikan dan mendukung pemajuan budaya lokal. Di sisi lain, hal tersebut sekaligus sebagai upaya penguatan interaksi antar budaya yang ada di Yogyakarta sehingga akan menciptakan harmonisasi dan keselarasan di antara berbagai budaya yang turut tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Kajian ini berusaha menguraikan strategi kebudayaan yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, evaluasi dari pelaksanaannya, serta tawaran kebijakan dan program kebudayaan yang baru guna meningkatkan interaksi budaya di Kota Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai kota yang menjadi tujuan utama untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari penghidupan oleh karena dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata, Yogyakarta memiliki potensi atas keragaman budaya yang dibawa oleh pendatang yang menempuh pendidikan maupun bekerja di kota ini. Di sisi yang bersamaan, Yogyakarta juga dikenal sebagai jantung alias pusat kebudayaan Jawa. Di sinilah pada mulanya berdiri Kerajaan Mataram pada abad ke-16 atau sekitar hampir 500 tahun silam.

Modernisasi dan globalisasi, terutama di era yang serba digital seperti saat ini, menimbulkan potensi tergerusnya budaya Jawa di pusat kebudayaannya itu sendiri. Kajian ini berusaha menjelaskan kaitan antara usaha pelestarian budaya Jawa, interaksinya dengan budaya luar yang dibawa oleh pendatang, serta usaha pemajuan kebudayaan guna mendukung interaksi antar budaya yang membawa

keharmonisan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Yogyakarta itu sendiri. Maka kemudian, dirumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika interaksi budaya antara masyarakat lokal dan pendatang di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial dan budaya antara masyarakat lokal dan pendatang di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan interaksi budaya di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Kajian

Secara umum, kajian ini menyusun analisis tentang implementasi kebijakan, tantangan, serta tawaran yang diberikan sebagai solusi dalam permasalahan terkait interaksi antar budaya yang terjadi di Kota Yogyakarta. Secara spesifik, setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dari kajian ini:

1. Mengidentifikasi dinamika interaksi budaya antara masyarakat lokal dan pendatang di Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial dan budaya antara masyarakat lokal dan pendatang di Kota Yogyakarta.
3. Memberikan analisis kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menghadapi tantangan interaksi budaya.

1.4 Sasaran dan Manfaat Kajian

Adapun target dan sasaran yang ingin dicapai dalam kajian Kebijakan Tantangan dalam Interaksi Budaya di Kota Yogyakarta adalah dibentuknya kajian akademis terkait analisis pelaksanaan kebijakan Tantangan dalam Interaksi Budaya di Kota Yogyakarta secara holistik dan komprehensif. Sehingga dengan demikian, nantinya dapat digunakan sebagai data dasar dan acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal evaluasi penerapan kebijakan guna menghadapi tantangan dalam interaksi budaya di Kota Yogyakarta.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum Kebijakan tentang Tantangan dalam Interaksi Budaya di Kota Yogyakarta telah diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 453 Tahun 2021 tentang Penetapan Layanan Sapa Budaya Kota Yogyakarta.

1.6 Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode campuran, menggabungkan antara teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Studi literatur menjadi tumpuan utama dalam kajian ini, ditambah dengan arsip-arsip berita serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan guna menyusun hasil akhir kajian ini. Artinya, metode penelitian sejarah juga turut disertakan di sini, terutama pada beberapa bagian yang memerlukan penjelasan historis sebagai basis pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Data statistik juga digunakan untuk mengukur secara rigid berbagai hal yang menjadi variabel dalam kajian ini, mulai dari pelaksanaan program-program kebudayaan, jumlah penduduk tetap dan pendatang, sampai terjadinya konflik antar kelompok yang membawa basis identitas budaya. Selain itu dilihat pula seberapa besar partisipasi atau keterlibatan warga, baik itu penduduk tetap maupun pendatang, pada gelaran kebudayaan yang diselenggarakan untuk mendorong interaksi yang terjalin dengan baik dan harmonis di Kota Yogyakarta.

Dari data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, lantas kesemuanya dianalisis guna membangun suatu narasi yang memetakan bagaimana kebijakan

kebudayaan selama ini dijalankan di Kota Yogyakarta. Dari sini nantinya akan terlihat seberapa jauh efektivitas dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai program yang telah dilaksanakan guna membina dan meningkatkan kesadaran kebudayaan serta interaksi antar masyarakat yang beragama kultur dan latar belakang yang terjadi di dalamnya. Hingga pada akhirnya, segala kelebihan dan kekurangan ini yang akan dijadikan pijakan bagi penyusunan tawaran alternatif program-program yang mendorong pemajuan dan pengembangan kebudayaan di lingkup Kota Yogyakarta.

1.7 Jenis dan Pendekatan Kajian

Kajian ini terutama menggunakan pendekatan studi kebudayaan dan sosiologis untuk memetakan serta melihat secara keseluruhan pola interaksi antar budaya yang terjadi di Kota Yogyakarta, terutama sepanjang dua dekade terakhir ketika Indonesia memasuki periode Reformasi.

Tidak hanya itu, pendekatan historis juga digunakan untuk melihat dalam rentang waktu yang panjang, utamanya pasca Indonesia merdeka pada 1945, bagaimana pola interaksi antar masyarakat yang beragam dalam hal kultur dan etnisitas serta kebijakan kebudayaan dilakukan di Kota Yogyakarta. Maka dari sini nantinya rumusan tawaran program-program kebudayaan yang baru dapat ditentukan dengan berkaca dari jalannya sejarah masyarakat dan kebudayaan Kota Yogyakarta itu sendiri.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Pertama, dilakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan kebijakan strategi kebudayaan yang sudah ada dan dilaksanakan selama ini. Data-data ini dihimpun antara lain dari artikel berita cetak maupun daring serta laporan resmi dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Berbagai konflik atau gesekan yang terjadi, yang didasarkan pada persoalan identitas budaya, juga turut dikumpulkan sebagai data untuk melihat sampai sejauh mana interaksi antar budaya ini menemui tantangan atau hambatan di akar rumput. Selain sumber-sumber data yang bersifat faktual, juga dihimpun berbagai macam sumber-sumber sekunder

yang telah meriset dan mengulas dengan cukup detail bagaimana pola interaksi budaya sampai kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta dalam lintasan zaman.

Sumber-sumber ini selain tersedia secara daring, juga dapat ditemukan di beberapa tempat. Sumber-sumber yang tersedia secara daring antara lain data penduduk milik Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, hingga berbagai media daring yang meliput dan mengulas berbagai macam program dan kegiatan kebudayaan yang berlangsung di Kota Yogyakarta. Termasuk di dalamnya kliping berita yang mewartakan berbagai ketegangan, konflik, dan gesekan yang mengandung sentimen etnik maupun kultural yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta. Kajian ini menghimpun sumber-sumber yang membahas tentang kebudayaan, demografi, sampai kebijakan Kota Yogyakarta yang terdapat di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Pusat Studi Kebudayaan UGM, Perpustakaan Kolese Ignatius, hingga Jogja Library Center Malioboro.

1.9 Teknik Analisis Data

Dari berbagai macam data yang telah dikumpulkan ini kemudian diklasifikasikan. Lantas kemudian, dari data-data yang ada dilakukan interpretasi tentang sejauh mana pelaksanaan kebijakan kebudayaan yang telah disusun dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan. Selain itu juga dianalisis interaksi antar budaya itu sendiri yang terjadi di antara berbagai macam penduduk Kota Yogyakarta, khususnya interaksi yang berlangsung secara organik di tingkat akar rumput. Analisis ini lantas akan menunjukkan letak keberhasilan, hambatan, serta tantangan yang terjadi dalam usaha pemajuan interaksi antar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Maka dengan demikian, dapat disusun sebuah tawaran program maupun kebijakan alternatif sekaligus kebaruan guna semakin meningkatkan kemajuan strategi kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta.

1.10 Sistematika Penulisan

Kajian ini secara keseluruhan terdiri atas enam bab. Bab Pertama menguraikan latar belakang serta tujuan dari kajian ini, terutama untuk memberikan gagasan, tawaran alternatif serta kebaruan untuk usaha pemajuan kebudayaan dan interaksi antar budaya di Kota Yogyakarta. Kemudian pada Bab Kedua diuraikan gambaran umum Kota Yogyakarta dari segi demografi penduduk, struktur sosial masyarakat yang membentuk lanskap kota, sampai perkembangan ruang budaya yang ada di kota ini. Diuraikan pula hambatan dan tantangan apa saja yang selama ini terjadi berkaitan dengan persoalan interaksi antar budaya.

Selanjutnya pada Bab Ketiga diuraikan mengenai dinamika interaksi budaya yang terjadi di Kota Yogyakarta. Pada bab ini dijelaskan antara lain bentuk dan pola interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi, potensi konflik maupun ketegangan budaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi, hingga praktik baik dan inisiatif lokal yang dilakukan guna mendorong dialog dan pemajuan kebudayaan. Berlanjut pada Bab Keempat yang memberikan analisis atas kebijakan yang telah dilakukan pemerintah kota dalam bidang kebudayaan. Bab ini meninjau efektivitas atas implementasi program kebudayaan, peran pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan, serta gap analisis antara kebutuhan dan respons kebijakan.

Bab Kelima yang menjadi inti pokok dari kajian ini menguraikan strategi dan rekomendasi yang ditawarkan guna mengatasi problem interaksi antar budaya yang terjadi di Kota Yogyakarta. Di dalamnya termuat antara lain strategi penguatan interaksi budaya yang inklusif, rekomendasi program/kegiatan prioritas, rancangan model kebijakan atau intervensi sosial-budaya, dan indikator keberhasilan dan rencana tindak lanjut. Seluruh uraian yang ada di dalam kajian ini lantas disimpulkan dalam Bab Keenam, yang mana di dalamnya juga memuat saran dan pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan pada masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN KONTEKS SOSIAL-BUDAYA

2.1. Profil Demografi dan Migrasi Penduduk

Sejarah Kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam pada dekade-dekade akhir abad ke-16. Raden Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senapati membuka suatu wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Alas Mentaok sebagai tempat berdirinya istana kerajaan. Wilayah yang kini masuk dalam Kemantren Kotagede tersebut menjadi penanda bagi berdirinya sebuah kerajaan yang kelak akan dianggap sebagai jantung sekaligus pusat dari kebudayaan Jawa. Berselang dua abad dari berdirinya Mataram Islam, kerajaan tersebut mengalami banyak dinamika dan pergolakan yang kemudian memaksa terjadinya pembagian kekuasaan. Kerajaan akhirnya dipecah menjadi dua pada 1755 melalui sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti, yang mana membuat Kasultanan Mataram berubah wujud menjadi dua entitas: Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.



Gambar 2. 1 Gambar Keraton Kasultanan Yogyakarta sebagai pusat dari peradaban sekaligus jantung bagi kebudayaan Jawa. Di sinilah kemudian apa yang disebut sebagai Kota Yogyakarta lahir sebagai sebuah kotapraja di masa kemerdekaan Indonesia. (Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta)

Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat inilah yang lantas menjadi awal mula bagi terbentuknya Kota Yogyakarta modern yang dikenal pada hari ini. Dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I, segera saja Yogyakarta berdiri sebagai wilayah semi otonom di bawah kekuasaan besar VOC, kongsi dagang yang sekaligus menjadi penguasa secara politik dan militer bagi sebagian besar wilayah Jawa, dan nantinya beralih ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Keraton Kasultanan yang dibangun beberapa kilometer di sisi barat bekas keraton lama Mataram Islam kemudian bertumbuh menjadi pusat utama sekaligus jantung sebuah kota bernama Kota Yogyakarta.

Kendati sering disebut sebagai jantung sekaligus pusat kebudayaan Jawa, sudah sejak awal berdiri Yogyakarta menjadi wilayah yang terbuka bagi kaum pendatang. Tercatat orang-orang Tionghoa sudah berdiam diri di Yogyakarta sejak abad ke-18. Para migran pedagang ini sudah lama dikenal sebagai kelompok yang menjadi perantara, terutama dalam kegiatan pertukaran komoditas dan perdagangan. Kelompok Tionghoa ditempatkan dalam sebuah wilayah tertentu untuk tinggal bersama-sama di sana, yang kelak kemudian dikenal sebagai Kampung Ketandan. Letaknya berada di sisi utara Keraton Yogyakarta.



Gambar 2. 2 Gambar Kampung Ketandan yang terletak di Kawasan Malioboro menjadi bukti bagaimana kehidupan multikultur yang ada di Kota Yogyakarta telah berlangsung selama beberapa abad lamanya. (Sumber: Detik)

Selang seabad kemudian, orang-orang Eropa juga banyak yang bermigrasi ke wilayah ini. Mereka membuka perkebunan-perkebunan di seantero wilayah Kasultanan Yogyakarta dengan cara menyewa tanah dari para bangsawan istana. Tumbuh suburanya perkebunan tebu, tembakau, nila, kopi, dll. ini di Sleman, Bantul, hingga Kulonprogo diusahakan oleh para pemodal Eropa yang kemudian bermukim di Yogyakarta. Dapat disebut bahwa sejak semula, Yogyakarta sudah cukup ramai didatangi oleh para pendatang dari luar daerah, yang terutama sekali didorong oleh motif ekonomi.

Kehadiran pendatang semakin masif ketika Indonesia diproklamkan sebagai sebuah negara merdeka dan Kasultanan Yogyakarta menyatakan diri menjadi bagian dari Republik yang baru lahir pada 1945 ini. Tidak sampai setahun dari proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 4 Januari 1946 Yogyakarta secara resmi menjadi Republik Indonesia. Saat itu Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sedang diduduki oleh Belanda yang dibantu pasukan Sekutu yang ingin kembali menduduki wilayah yang masih mereka anggap sebagai Hindia Belanda tersebut. Hijrahnya pimpinan puncak Republik yaitu Sukarno dan Mohammad Hatta ke Yogyakarta, disertai dengan perangkat pemerintahan pusat lainnya seperti menteri-menteri dan pejabat tinggi lainnya menjadi salah satu penanda penting bagi terbukanya Yogyakarta pada mereka yang berasal dari luar kota.



Gambar 2. 3 Gambar Kawasan Kotabaru yang pada masa kolonial sekitar awal abad ke-20 menjadi permukiman bagi kelompok Eropa, selain juga Benteng Vredeburg yang pada masa sebelumnya juga menjadi tempat tinggal bagi kaum kulit putih. (Sumber: jogjakota.go.id)

Berpindahnya ibukota ke Yogyakarta tidak hanya dilakukan oleh perangkat pemerintahan saja, melainkan banyak penduduk juga turut hijrah ke sini. Mereka yang mengungsi adalah penduduk yang berasal dari wilayah yang telah diduduki tentara Belanda, utamanya Jakarta dan Jawa Barat. Segera saja Yogyakarta menjadi kota yang penuh dengan penduduk yang berasal dari luar kota, yang berharap mencari perlindungan dan penghidupan di tengah situasi perang dan Revolusi yang tengah berkecamuk. Tidak ketinggalan, migran yang berasal dari dalam wilayah Kasultanan sendiri jumlahnya tidak kalah sedikit. Hancurnya perekonomian dan krisis pangan yang terjadi semasa penjajahan Jepang

membuat orang-orang dari wilayah pedesaan dan kabupaten memilih mencari penghidupan baru di Yogyakarta sebagai kota sekaligus pusat kerajaan.



Gambar 2. 4 Gambar Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang sedang dilantik oleh Presiden Sukarno ketika Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia sepanjang 1946 hingga 1949. (Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

Arus besar datangnya penduduk baru di wilayah Yogyakarta semakin masif seiring berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM) pada pengujung 1949. Sebagai universitas nasional pertama yang didirikan pemerintah Indonesia, segera saja UGM menjadi tujuan utama para calon mahasiswa dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di kota ini. Dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa yang diterima menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan sebagian besar dari mereka merupakan perantau dari luar Yogyakarta. Berdirinya UGM juga kemudian diikuti dengan menjamurnya kampus-kampus swasta yang banyak berdiri di Yogyakarta. Maka tidak mengherankan jika kemudian Yogyakarta juga mendapatkan julukan sebagai kota pelajar.



Gambar 2. 5 Gambar Kampus Universitas Gadjah Mada saat masih menempati kompleks Keraton Yogyakarta dalam dekade 1950-an hingga 1960-an, yang mana mahasiswa kampus ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. (Sumber: Detik)

Selain tumbuhnya kampus yang begitu masif, pariwisata juga turut mempengaruhi dalam mendorong hadirnya migran dalam jumlah yang tidak sedikit ke Yogyakarta. Memasuki periode Orde Baru, perlahan Yogyakarta tumbuh menjadi kota yang menjadi tujuan wisata. Keberadaan Keraton sebagai simbol dari penjaga budaya Jawa, serta Yogyakarta yang masih menyimpan “keaslian” kota, menjadikan para pelancong dari dalam maupun luar negeri datang ke sini. Otomatis kegiatan ekonomi dalam sektor ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk asli Yogyakarta saja, melainkan mengundang para pendatang yang ingin mengadu nasib dan memperoleh penghidupan di kota ini. Maka tidak heran misalnya pada waktu belakangan ini, para pedagang kaki lima maupun penjaja segala rupa makanan, pernak-pernik, maupun oleh-oleh di seputaran Malioboro banyak dikerjakan oleh para pendatang dari luar Yogyakarta. Luas Kota Yogyakarta yang menjadi wilayah terkecil di antara kabupaten/kota lainnya di

Daerah Istimewa Yogyakarta dipenuhi dengan penduduk yang tersebar ke dalam 14 kemantren (kecamatan).



Gambar 2. 6 Gambar Pasar Beringharjo yang terletak di sebelah selatan kawasan Malioboro. Sejak masa kolonial, Kota Yogyakarta telah memiliki daya tariknya tersendiri yang menyebabkan arus besar migrasi dari berbagai daerah terus menerus memenuhi kota ini pasca Indonesia merdeka. (Sumber: Jejak Kolonial)

Gambar di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang tercatat dalam Sensus Penduduk 2020. Tercatat setidaknya ada 416.177 jiwa yang tersebar ke dalam 14 kemantren di seluruh Kota Yogyakarta. Tabel di bawah menunjukkan bahwa Kemantren Umbulharjo menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak. Sedangkan Kemantren Pakualaman menjadi wilayah dengan penduduk paling sedikit.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta pada 2020

NO	KEMANTREN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	TEGALREJO	18.265	4,39%	19.110	4,59%	37.375	8,98%
2	JETIS	13.320	3,20%	14.061	3,38%	27.381	6,58%
3	GONDOKUSUMAN	20.852	5,01%	22.289	5,36%	43.141	10,37%
4	DANUREJAN	10.475	2,52%	10.915	2,62%	21.390	5,14%
5	GEDONGTENGEN	9.758	2,35%	10.128	2,43%	19.886	4,78%
6	NGAMPILAN	9.079	2,18%	9.404	2,26%	18.483	4,44%
7	WIROBRAJAN	13.701	3,29%	14.383	3,46%	28.084	6,75%
8	MANTRIJERON	17.360	4,17%	18.273	4,39%	35.633	8,56%
9	KRATON	10.662	2,56%	11.243	2,70%	21.905	5,26%
10	GANDOMANAN	7.309	1,76%	7.681	1,85%	14.990	3,60%
11	PAKUALAMAN	5.156	1,24%	5.575	1,34%	10.731	2,58%
12	MERGANGSAN	15.518	3,73%	16.495	3,96%	32.013	7,69%
13	UMBULHARJO	34.549	8,30%	35.989	8,65%	70.538	16,95%
14	KOTAGEDE	17.068	4,10%	17.499	4,21%	34.567	8,31%
	JUMLAH	203.072	48,80%	213.045	51,20%	416.117	100,00%

Sumber: *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2020*.
(Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020)

Dengan sendirinya, menilik pada komposisi antara penduduk lokal dengan pendatang yang tersebar di seantero kota, Kota Yogyakarta dapat disebut menjadi kota yang heterogen dan multikultur, meski secara umum basis tiap wilayahnya masih didominasi oleh penduduk asli yang beretnis Jawa. Namun jika dicermati lebih lanjut, tiap-tiap kampung kota yang ada di Yogyakarta tidak sedikit ditinggali oleh para pendatang yang bekerja, bersekolah, hingga akhirnya menetap di kota ini dalam jangka waktu yang agak lama. Berbagai kelompok pendatang dengan beragam etnis dan kultur yang ada ini kemudian hidup berdampingan dengan kebudayaan Jawa yang masih tetap menjadi payung besar bagi demografi sosial dan budaya Kota Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka kemudian membaaur dan menyatu dalam kebudayaan Jawa, sehingga lazim ditemui bahwa apapun latar belakang etnis maupun sukunya, apabila telah lama tinggal di Yogyakarta maka kemungkinan besar ia akan fasih berbahasa Jawa (Bambang Hidayana 1998:105-110).

2.2. Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat

Sebagai kota yang menjadi pusat dari Kasultanan Yogyakarta, struktur sosial masyarakat di kota ini mulanya terbagi secara umum ke dalam dua kelompok besar, yaitu kaum bangsawan kerajaan dan rakyat biasa. Meski secara hierarki sosial dan politik terjadi pembelahan seperti di atas, secara umum masyarakat Yogyakarta pada mulanya adalah masyarakat agraris, hidup dari basis pertanian sebagai sumber utama perekonomian kota. Kehidupan keraton sebagai pusat politik, pemerintahan, dan kebudayaan, didukung sepenuhnya oleh hasil-hasil pertanian yang kemudian dibayarkan oleh petani sebagai upeti kepada raja.

Seiring berjalannya waktu, struktur masyarakat ini mengalami perubahan yang signifikan. Masuknya usaha perkebunan dan industri di sekitar wilayah Yogyakarta memunculkan kelas buruh atau pekerja yang menggantungkan hidupnya dari bekerja di pabrik dan perkebunan sebagai orang upahan. Di masa Indonesia merdeka ketika Yogyakarta menjadi tujuan para pelajar dari berbagai daerah, serta kota wisata yang didatangi oleh turis lokal maupun mancanegara, menjadikan pekerjaan di sektor jasa juga tumbuh dan berkembang dengan pesat. Banyak penduduk mulai mengembangkan usaha mandiri alias swasta sebagai mata pencaharian mereka. Sebut saja usaha restoran, penginapan, indekos, binatu, ojek, pemandu wisata, dan berbagai macam usaha-usaha lainnya guna mendukung tingginya angka pendatang yang tinggal menetap baik untuk belajar maupun sekadar melancong di kota ini. Artinya, arus besar modal dan kapital dari luar ini yang kemudian direspons oleh masyarakat lokal Yogyakarta dengan berbagai macam bentuk usaha dan mata pencaharian yang mereka dirikan dan kreasikan sesuai dengan kebutuhan para pendatang tersebut.

Dari segi kebudayaan, masyarakat Yogyakarta yang adalah juga masyarakat Jawa memiliki kecenderungan sebagai komunitas yang komunal, menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, berbagi, dan saling peduli satu sama lain. Kesamaan identitas menjadi basis kebudayaan masyarakat Yogyakarta yang komunal, yang disimbolkan dengan berbagai kegiatan yang umumnya

mewajibkan partisipasi individu dalam setiap prosesnya. Ambil misal, kegiatan *slametan*, ronda, bersih kampung, dll. yang mensyaratkan keterlibatan aktif tiap individu dalam satu lingkungan tempat tinggal untuk turut serta dalam berbagai kegiatan bersama. Masyarakat Jawa yang adalah masyarakat agraris selalu membutuhkan kerja-kerja kolektif dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Agak sulit untuk menjadi individu yang tidak terlibat dalam kerja-kerja yang bersifat komunal karena walaupun Yogyakarta adalah sebuah kota, masyarakatnya terdiri atas etnis Jawa yang akar historisnya merupakan masyarakat desa yang amat komunal dan kolektif. Inilah yang membentuk wajah Yogyakarta, yang semangat kebersamaan dan gotong royongnya masih terus eksis hingga kini.

Meski kemudian, dalam perkembangannya tidak dimungkiri terjadi pergeseran yang pelan tapi pasti dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta. Perkembangan kota yang semakin urban, metropolitan, dan heterogen menyebabkan nilai-nilai sosial dan budaya lama perlahan tergerus, tergantikan dengan nilai-nilai baru yang dibawa dari luar. Pragmatisme, individualisme, dan kapitalisme hanyalah beberapa contoh nilai-nilai baru yang berasal dari luar kemudian masuk, berkembang, dan menggejala di tengah-tengah masyarakat, yang lantas sedikit-banyak mengubah lanskap sosial budaya masyarakat kota. Munculnya kelas masyarakat baru seiring dengan tumbuhnya perguruan tinggi yang marak dan menjamur di Yogyakarta, yang kemudian disebut sebagai kelas menengah, turut mewarnai pergeseran tersebut. Walau tidak sepenuhnya mengubah wajah sosial dan budaya kota, namun peralihannya ini semakin terasa nyata.

2.3. Perkembangan Kawasan Budaya dan Ruang Interaksi

Ruang budaya di Kota Yogyakarta yang jumlahnya amat banyak dan melimpah kemungkinan besar merupakan suatu anugrah dan keistimewaan yang rasanya hampir tidak ditemukan di kota-kota lainnya. Keberadaan Keraton sebagai pusat budaya sekaligus simbol paling nyata dari kebudayaan Jawa menjadikan kota ini memiliki banyak ruang yang berkait erat dengan kebudayaan. Keberadaan Keraton selain sebagai pusat kekuasaan dan pemerintahan, juga

kerap dianggap sebagai benteng penjaga untuk terus merawat dan melestarikan kebudayaan Jawa.

Ruang budaya sendiri dapat didefinisikan sebagai tempat di mana pertemuan, kegiatan, penyelenggaraan suatu perhelatan kebudayaan digelar dan dilaksanakan. Tempat-tempat ini biasanya berbentuk sebuah ruang formal yang secara khusus dibangun dan dibentuk oleh komunitas, lembaga, atau otoritas tertentu yang memiliki perhatian pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sifatnya khas dan terstruktur. Bila diartikan secara lebih luas, ruang budaya juga dapat berarti ruang di manapun yang dapat dijadikan tempat untuk berinteraksi antar masyarakat dengan berbagai wujud budaya paling fundamental. Segala tempat dapat menjadi ruang budaya ketika manusia yang ada di atasnya dapat menghidupkan berbagai macam bentuk, ritus, dan laku kebudayaan yang mereka jalani, yakini, dan hidupi.

Beberapa tempat yang secara formal menjadi ruang budaya di Yogyakarta antara lain Taman Budaya Yogyakarta. Lebih jauh lagi, Keraton Yogyakarta juga selain sebagai sebuah tempat pemerintahan secara kultural di masa lalu, juga menjadi sebuah ruang budaya yang masih terus berlangsung hingga kini. Kawasan eks permukiman Eropa di Kotabaru dan Benteng Vredeburg juga menjadi ruang budaya berikutnya. Ada pula Kampung Ketandan yang selama ini dikenal sebagai wilayah pecinan juga menyimpan banyak sekali cerita sekaligus saksi bisu bagi perjalanan sejarah kota. Kawasan Kotagede juga tidak kalah penting sebagai sebuah wilayah yang menjadi tempat bagi sejarah panjang perjalanan Kota Yogyakarta. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang memiliki banyak museum. Galeri dan studio seni juga menjadi salah satu ciri khas Yogyakarta yang rasanya hampir tidak dimiliki kota-kota lain di Indonesia.

Ruang-ruang budaya yang jauh lebih cair dan tidak formal jumlahnya justru jauh lebih banyak lagi. Sebagai contoh, pasar menjadi tempat pertemuan dari berbagai masyarakat di Kota Yogyakarta.

2.4. Tantangan Sosial Budaya di Era Multikultural dan Modernisasi

Semakin canggihnya teknologi komunikasi dan informasi di era digital seperti sekarang, ditambah semakin menyempitnya jarak dan ruang seiring dengan kemajuan peradaban dunia menjadikan manusia semakin terisolasi dalam kesendirian. Nyaris segala sesuatu dapat dikerjakan melalui sekali sentuh pada tombol maupun layar gawai masing-masing, sehingga interaksi antar manusia secara nyata dan langsung kini mengalami penurunan yang amat drastis, dibandingkan misalnya 20 tahun lalu ketika teknologi komunikasi bernama internet belum populer seperti sekarang. Terjadi peralihan besar-besaran dari budaya yang bersifat komunal menjadi individual, dengan ruang interaksi yang makin menyempit dan terkunci dalam ruang-ruang yang lebih privat. Inilah kenyataan di era digital saat ini yang nyaris mustahil terbendung.

Maka kemudian, pelaku budaya mesti menyesuaikan, antara mengubah bentuk budaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, ataupun melakukan inovasi agar kebudayaan yang ada dapat jauh lebih menarik dan membangkitkan minat para individu penikmat budaya. Termasuk dalam hal ini cara menikmati dan mengapresiasi produk-produk kebudayaan maupun kesenian mengalami perubahan yang tidak kalah drastis. Banyak orang lebih memilih untuk menikmati sebuah produk budaya melalui gawainya masing-masing ketimbang harus datang secara langsung ke tempat-tempat di mana pertunjukan digelar. Individualisme menjadi tantangan yang mesti dihadapi dan disiasati oleh para pelaku budaya.

Tidak hanya pelaku budaya, namun pemerintah selaku pemilik otoritas dan pembuat kebijakan juga mesti memikirkan cara untuk menjangkau generasi yang saat ini mulai tersekat ke dalam individualisme tersebut. Harapannya, kegiatan dan program kebudayaan yang diselenggarakan dapat menarik minat generasi muda yang notabene menjadi sasaran utama bagi pelaksanaan program-program pengembangan dan pemajuan kebudayaan yang nantinya dapat memperkuat dan mempererat interaksi antar budaya tersebut. Oleh sebab, pada dasarnya merekalah para generasi muda yang diharapkan untuk menjadi generasi baru

Indonesia di masa mendatang yang dapat terus hidup bersama secara harmonis dalam keragaman budaya yang ada dan dimiliki masing-masing individu tersebut.

Problem lain yang kemudian muncul seiring dengan kemajuan zaman adalah kapitalisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Artinya, sistem perekonomian dunia kian berorientasi pada profit semata, yang mana mengabaikan manusia yang bekerja di dalam sistem tersebut. Ketika masyarakat terhisap ke dalam kerja sehari-hari yang seringkali memisahkan secara sosial antara satu individu warga masyarakat dengan individu warga masyarakat lainnya, maka interaksi yang berbasis sosial maupun kebudayaan mengalami disrupsi. Manusia menjadi semakin individualis dan egosentris karena dipaksa terus menerus untuk bekerja dan mengakumulasi modal. Sehingga dengan demikian relasi interpersonal seringkali hanya dinilai sebagai kegiatan transaksional semata.

Tantangan budaya lainnya yang semakin marak seiring dengan sistem perekonomian dunia yang semakin kapitalis dan membuat manusia semakin individualis adalah terjadinya komodifikasi budaya. KBBI mendefinisikan komodifikasi sebagai perubahan fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak dipandang sebagai suatu produk komersial menjadi komoditas. Maka dalam ranah kebudayaan, komodifikasi budaya dapat diartikan sebagai perubahan fungsi kebudayaan dari yang semula bersifat sakral dan menjadi dimiliki semua orang, perlahan dijadikan sebuah komoditas bernilai material semata. Artinya, fungsi kebudayaan jatuh sebagai semata sebuah produk atau komoditas yang dijadikan mesin penghasil uang saja, tanpa memedulikan isi, bentuk, dan bahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Komodifikasi menjadi turunan langsung dari kapitalisme, yang mana memandang segala sesuatunya dari kacamata ekonomi dan pelipatgandaan keuntungan dari sesuatu yang mulanya bukan dimaksudkan untuk dikomersialisasi atau diperjualbelikan.

Tantangan budaya lainnya yang saat ini juga tengah marak terjadi adalah gentrifikasi. Gentrifikasi dalam KBBI didefinisikan sebagai imigrasi penduduk kelas

ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaharui dan dipermodern. Fenomena ini terjadi di kota-kota yang pada mulanya bukan menjadi pusat-pusat perekonomian besar seperti misalnya Bali, Bandung, termasuk Yogyakarta. Banyak orang-orang dari kelas menengah ke atas perkotaan besar, terutama Jakarta, pergi ke kota-kota yang lebih kecil dan mulai membangun banyak hal yang dianggap sesuai dengan ide, nilai, dan kebiasaan mereka, yang kesemuanya dapat menghasilkan keuntungan berkali lipat bagi mereka.

Dengan kehadiran sekelompok orang yang memiliki pendapatan yang jauh berkali lipat dibandingkan penduduk setempat, maka seringkali terjadi kenaikan harga-harga properti di suatu kawasan oleh karena daya beli para pendatang yang amat tinggi. Kondisi ini menciptakan suatu peningkatan drastis pada berbagai komoditas sehingga membuat penduduk asli kesulitan untuk mengakses oleh sebab pendapatan mereka tidak sebesar para pendatang yang bahkan kadang bekerja secara jarak jauh dan menerima gaji setara dengan kota-kota besar dunia. Tidak terelakkan lagi kemudian terjadi peminggiran masyarakat lokal, segregasi ruang hidup, dan berbagai macam problem sosial budaya lainnya.

Pada akhirnya, berbagai tantangan di atas mulai dari individualisme, kapitalisme, komodifikasi, hingga gentrifikasi mengakibatkan pergeseran yang amat signifikan dalam pola interaksi antar budaya di kalangan masyarakat urban atau perkotaan, apalagi dengan masyarakat kota yang memiliki latar belakang kultur yang berbeda-beda.

BAB III

DINAMIKA INTERAKSI BUDAYA DI KOTA YOGYAKARTA

3.1. Bentuk dan Pola Interaksi antara Masyarakat Lokal dan Pendatang

Interaksi antar budaya bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam sejarahnya, Yogyakarta menjadi kota yang memiliki keragaman latar belakang penduduknya, setidaknya sejak masa kolonial Belanda berkuasa. Meski pada dasarnya etnis Jawa tetap yang paling dominan baik secara kultural maupun jumlah penduduk, keberadaan kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berlainan juga tidak sedikit. Artinya, meski belum menjadi wilayah metropolitan, Yogyakarta tetaplah dapat disebut sebagai wilayah yang kosmopolitan.

Sejak masa kolonial, tercatat berdiri kawasan permukiman khusus untuk orang-orang Tionghoa dan Eropa yang jumlahnya lumayan banyak terdapat di Yogyakarta. Meski saat itu politik segregasi pemerintah kolonial masih diterapkan, sehingga dengan demikian interaksi antara masyarakat lokal dengan etnis lain menjadi amat terbatas, namun dapat disebut bahwa sejak masa ini Yogyakarta bukanlah tempat tertutup bagi kelompok pendatang. Bergabungnya wilayah Kasultanan Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia pada 1945 menjadikan Yogyakarta sebagai wilayah yang semakin terbuka bagi siapapun yang ingin tinggal menetap di sini. Berdirinya UGM sebagai kampus nasional pertama yang diikuti dengan menjamurnya kampus-kampus lain menjadikan Yogyakarta benar-benar miniatur Indonesia oleh sebab hampir seluruh kelompok etnik dan suku dari seantero Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, ada semuanya di Yogyakarta.

Berkaitan dengan bentuk dan pola interaksi yang terjadi antara masyarakat lokal Yogyakarta dengan kelompok pendatang, bisa disebut proses akulturasi budaya cukup mendominasi pada bentuk-bentuk interaksi kebudayaan. Sebagai contoh, dalam ranah kuliner, Yogyakarta memiliki makanan khas yang kemudian menjadi ikon pariwisata kota, yakni bakpia. Pada mulanya, bakpia adalah makanan khas Tionghoa yang bermukim di Yogyakarta. Proses akulturasi kemudian terjadi dengan mengubah isian bakpia yang umumnya daging babi

menjadi kacang hijau, menyesuaikan dengan masyarakat umum Yogyakarta yang mayoritas adalah penganut Islam. Segera saja setelah itu bakpia menjadi makanan khas Yogyakarta dan buah tangan andalan bagi para wisatawan yang melancong di kota ini (Martiana dan Rahadjeng 2024:383-384).



Gambar 3. 1 Gambar Bakpia sebagai makanan hasil proses akulturasi antara kebudayaan Tionghoa dan Indonesia. Kini menjadi makanan khas sekaligus ikon Yogyakarta. (Sumber: Jogja Tourism Training Center)

Keberadaan masyarakat pendatang sejak masa kerajaan juga diperhatikan secara langsung oleh Keraton Yogyakarta. Misalnya saja, dalam struktur prajurit tradisional Keraton, terdapat antara lain Prajurit Bugisan dan Prajurit Daengan. Dari namanya, dapat ditengarai bahwa mereka berasal dari wilayah yang kini disebut sebagai Sulawesi Selatan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, dapat diketahui bagaimana masyarakat pendatang di Yogyakarta mendapat perhatian dari otoritas setempat. Artinya, interaksi antar budaya di kota ini telah berlangsung begitu lama, dengan bentuknya yang amat cair. Setiap kebudayaan baru yang masuk dan datang ke kota ini akan selalu menemui proses “negosiasi” untuk kemudian membaaur ataupun melebur dengan kebudayaan lokal setempat.



Gambar 3. 2 Gambar Prajurit Bugisan sebagai salah satu pasukan Keraton Yogyakarta yang dahulu adalah orang-orang Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. (Sumber: kratonjogja.id)



Gambar 3. 3 Gambar Prajurit Dhaengan sebagai salah satu pasukan Keraton Yogyakarta yang dahulu adalah orang-orang Makassar yang berasal dari Sulawesi Selatan. (Sumber: kratonjogja.id)

Jika menilik lebih jauh dan lebar lagi, secara umum kebudayaan Jawa yang berkembang di Yogyakarta itu sendiri merupakan hasil akulturasi dan penyerapan dari berbagai kebudayaan besar lainnya. Akulturasi itu antara lain terwujud dalam segi arsitektur, di mana terjadi kombinasi bentuk rumah yang memadukan model Jawa dan Eropa, yang kemudian dikenal sebagai bangunan Indis. Kebudayaan Hindu Buddha (India) maupun Islam (Timur Tengah) juga banyak tercermin dalam berbagai bentuk material maupun ritus kebudayaan Jawa itu sendiri. Semisal upacara *Garebeg Maulud*, *Garebeg Sawal*, dan *Garebeg Besar* yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya oleh Keraton Yogyakarta menandai suatu ritus yang merupakan percampuran antara tradisi Hindu dan kepercayaan Islam.



Gambar 3. 4 Gambar Upacara Garebeg yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Kasultanan Yogyakarta, yang mana upacara tersebut kental dengan nuansa akulturasi budaya, terutama dari gunungan yang diberikan oleh Sultan kepada rakyatnya tersebut. (Sumber: kratonjogja.id)

Ringkasnya, bentuk dan pola interaksi antara masyarakat lokal Yogyakarta dengan kelompok pendatang didominasi oleh bentuk akulturasi, peleburan dan pembauran yang terjadi di berbagai aspek, baik itu kebudayaan secara material maupun ritus kepercayaan. Akulturasi ini terjadi pada setiap strata maupun

kalangan, baik itu di Keraton yang dianggap sebagai pusat kebudayaan sekaligus pusat kekuasaan politik, maupun pada masyarakat umum secara luas yang menjadi warga kota.



Gambar 3. 5 Gambar Tamansari yang menjadi tempat pemandian sekaligus taman air milik Keraton Kasultanan Yogyakarta. Arsitektur Tamansari mengadopsi gaya Eropa, dirancang oleh seorang arsitek asal Portugis. (Sumber: keratonjogja.id)

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Budaya

Interaksi antar budaya ini tidak tiba-tiba terjadi begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang panjang dan penuh dengan negosiasi, kompromi, maupun penyesuaian-penyesuaian lainnya sehingga pada akhirnya sebuah budaya, nilai, dan norma baru dapat diterima menjadi bagian integral dari kebudayaan setempat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar budaya tersebut. Salah satu hal yang paling penting dan berpengaruh adalah sejarah dan latar belakang budaya. Berbagai macam kelompok etnik dengan latar belakang kultural yang sangat beragam yang masuk ke Yogyakarta memiliki riwayat sebagai bangsa pengelana. Sebut saja kelompok Tionghoa, Arab, India, hingga Eropa,

kesemuanya merupakan penjelajah sekaligus pedagang yang mencoba mengadu peruntungan di tempat yang amat jauh dari asal mereka di seberang lautan.

Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi interaksi budaya yakni komunikasi dan bahasa. Percakapan, pertukaran informasi, dan berbagai persinggungan lisan maupun tulisan menjadi suatu hal yang amat menentukan dalam interaksi antar budaya. Di masa kolonial, para pendatang dari berbagai tempat di belahan dunia kemudian disatukan dalam sebuah *lingua franca* bernama bahasa Melayu guna mengakomodir kebutuhan komunikasi satu sama lain dalam keseharian, politik, sampai perniagaan. Meski demikian, terjadi penyerapan bahasa yang jumlahnya cukup signifikan, hingga membentuk apa yang kini disebut sebagai bahasa Indonesia. Dalam kenyataannya komunikasi dan percakapan ini seringkali dibatasi dengan segregasi ras dan sosial yang dilanggengkan oleh pemerintah kolonial.

Faktor berikutnya adalah aktivitas ekonomi dan perdagangan. Hal ini yang pada mulanya mendorong sebuah kelompok melakukan migrasi ke suatu tempat yang secara kultural berbeda dengan mereka. Di Yogyakarta sendiri, sedari masa kolonial orang-orang Tionghoa datang ke kota ini sebagai kelas pedagang, yang dalam dunia kolonial diposisikan sebagai perantara sekaligus distributor komoditas. Orang-orang Eropa yang menetap di Yogyakarta juga didorong oleh usaha mereka membuka perkebunan di wilayah sekitar kota, di mana mereka dapat mengakumulasi kapital dan memperoleh keuntungan besar yang nantinya akan mereka bawa pulang kembali ke Eropa.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, faktor politik dan kebijakan lokal berperan penting dalam membentuk dinamika interaksi antar budaya. Status keistimewaan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa memberikan ruang bagi pelestarian nilai-nilai budaya lokal, terutama budaya Jawa, melalui berbagai kebijakan daerah seperti perda pelestarian budaya, penguatan adat istiadat, serta kelembagaan budaya seperti Kraton Yogyakarta. Namun demikian, pemerintah kota juga menyadari realitas demografis Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata yang bersifat plural dan heterogen. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Yogyakarta memasukkan prinsip inklusivitas, multikulturalisme, dan penguatan kohesi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Program-program dialog antar budaya, penguatan forum-forum masyarakat lintas suku dan agama, serta festival budaya yang mengakomodasi berbagai ekspresi budaya non-Jawa merupakan contoh konkret dari upaya pemerintah kota untuk menjaga harmoni sosial.

Di sisi lain, dinamika politik nasional juga turut memberi pengaruh. Stabilitas politik Indonesia pasca-reformasi memberi ruang yang lebih luas bagi kebebasan berekspresi dan pengakuan atas identitas budaya yang beragam. Dalam konteks ini, Kota Yogyakarta menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas mahasiswa, pekerja migran, maupun pelaku industri kreatif dari berbagai daerah di Indonesia. Interaksi antar budaya diwarnai oleh percampuran antara budaya lokal Jawa dengan budaya etnis lain seperti Sunda, Batak, Minang, Bugis, Papua, hingga komunitas internasional. Meskipun keragaman ini menghadirkan potensi konflik sosial, namun kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang menekankan toleransi, pendidikan multikultural, dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar interaksi sosial, relatif mampu meredam potensi gesekan. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai contoh menarik dari model integrasi sosial di Indonesia.

Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan nasional dikenal dengan julukan Kota Pelajar, yang setiap tahunnya menerima ribuan mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), UIN Sunan Kalijaga, serta berbagai perguruan tinggi swasta lainnya menciptakan lingkungan multikultural yang dinamis. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran lintas budaya. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan secara tegas mendorong pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, dan pengembangan kepribadian yang menghargai keragaman. Melalui kurikulum yang

inklusif serta kegiatan ekstrakurikuler lintas budaya, proses pendidikan di Yogyakarta mempertemukan berbagai latar belakang etnis, bahasa, dan agama, sehingga memfasilitasi interaksi antar budaya secara alami di lingkungan pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, kesadaran budaya yang tinggi turut menjadi landasan kuat dalam menjaga harmonisasi di tengah masyarakat yang plural. Pemerintah Kota Yogyakarta secara aktif mengembangkan kebijakan pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan. Dalam perda ini ditegaskan pentingnya perlindungan nilai-nilai budaya lokal sekaligus membuka ruang interaksi budaya dengan komunitas pendatang, di mana Dinas Kebudayaan berperan sebagai pengampu kebijakan pelestarian tersebut. Berbagai program seperti *kampung budaya*, festival kesenian, hingga dialog budaya antar komunitas, menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat lokal Jawa dan masyarakat pendatang. Kesadaran budaya ini mengajarkan masyarakat untuk tidak hanya bangga pada budayanya sendiri, tetapi juga menghargai dan belajar dari budaya lain yang hidup berdampingan di Kota Yogyakarta. Sinergi antara pendidikan multikultural dan kesadaran budaya inilah yang menjadikan interaksi antar budaya di Yogyakarta berlangsung relatif harmonis dan adaptif.

Di Kota Yogyakarta, faktor agama dan nilai-nilai kepercayaan memainkan peranan penting dalam membentuk interaksi antar budaya di tengah kemajemukan masyarakatnya. Kota ini tidak hanya dihuni oleh penduduk lokal beretnis Jawa, tetapi juga masyarakat dari berbagai latar belakang daerah, budaya, serta agama yang datang untuk menempuh pendidikan dan bekerja. Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menjaga harmoni ini melalui berbagai regulasi yang menegaskan pentingnya toleransi beragama, salah satunya tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam perda ini, terdapat pengakuan terhadap pendidikan agama sebagai bagian integral dari pembentukan karakter peserta didik, dengan prinsip penghormatan terhadap keragaman agama dan

kepercayaan. Selain itu, pengembangan kepariwisataan berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk di dalamnya penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi bagian dari daya tarik budaya kota.

Lebih jauh, interaksi antar budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di Yogyakarta juga didukung oleh kebijakan-kebijakan non-formal seperti pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta, yang berperan aktif memfasilitasi dialog lintas agama dan menyelesaikan potensi konflik secara damai. FKUB sendiri dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Keberadaan forum ini mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan, dengan tetap memberi ruang bagi ekspresi keagamaan maupun kepercayaan masing-masing kelompok. Dengan demikian, nilai-nilai toleransi, gotong royong, serta filosofi *hamemayu hayuning bawana* yang menjadi ciri khas budaya Jawa kian memperkokoh interaksi sosial yang damai di tengah pluralitas Kota Yogyakarta.

3.3. Potensi Konflik dan Ketegangan Budaya

Tumbuhnya suatu kota dengan pesat, baik dari segi ekonomi, sosial, sampai pada persoalan demografi dan lanskap geografis, turut membawa permasalahan yang khas terjadi pada masyarakat urban. Konflik tidak muncul begitu saja, melainkan biasanya terbentuk dari pengalaman panjang selama beberapa periode lamanya, yang seringnya diawali dengan munculnya stereotip, stigma, maupun prasangka. Lantas ketika terdapat sebuah momentum yang dianggap tepat, bom waktu perasaan saling curiga tersebut meluap menjadi sebuah konflik terbuka.

Beruntungnya, di Yogyakarta sendiri konflik dan ketegangan budaya yang menjurus sampai kekerasan amat jarang terjadi, kendati tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Meski termasuk dalam wilayah yang dapat dikatakan aman, potensi terjadinya konflik dan kekerasan berbasis etnisitas dan kultural tetap ada. Bahkan jika tidak diatasi dan dicarikan solusi, konflik ini akan dapat terjadi

setiap saat. Beberapa hal di bawah ini menjelaskan beberapa hal yang dapat memicu pecahnya konflik berbasiskan identitas budaya, yang kemunculannya dapat dicegah dan permasalahannya dapat dimitigasi sejak awal.



Gambar 3. 6 Gambar Berita mengenai konflik antar etnis yaitu Madura versus Papua yang sempat menghebohkan warga Yogyakarta pada Februari 2025 lalu. (Sumber: Radar Jogja, 10 Februari 2025)

Pertama, segregasi sosial dan ekonomi sebagai imbas dari sistem perekonomian yang semakin kapitalis memunculkan kelompok-kelompok yang tinggal secara eksklusif dan terpisah dari masyarakat secara umum. Sistem permukiman warisan kolonial membagi-bagi tempat tinggal ini, semisal untuk etnis Tionghoa dan orang-orang Eropa yang selalu dipisahkan dengan penduduk bumiputra sebagai kelompok terbesar. Di Yogyakarta, hal serupa juga terjadi dengan penempatan kampung pecinan bernama Ketandan serta pembangunan kawasan Kotabaru. Namun, setelah Indonesia merdeka hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pembauran secara umum terjadi, sehingga potensi untuk saling mencurigai dan berbagai macam stigma lainnya dapat terkikis. Meski tidak dapat dimungkiri bahwa prasangka dan stereotip terhadap kelompok-kelompok

masyarakat pendatang masih belum sepenuhnya dapat terkikis habis. Hal ini dapat ditengarai dari komentar maupun unggahan di media sosial yang masih sering bernada rasis maupun etnosentris. Hal-hal semacam inilah yang mesti ditanggulangi dan dikikis habis, yang salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan kultural yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat dapat berbaaur dalam suatu wadah atau program kebudayaan tertentu.

Potensi konflik berikutnya dapat muncul oleh sebab perbedaan nilai dan norma dari tiap kelompok masyarakat yang ada. Pada dasarnya tiap kelompok masyarakat dengan basis kultural yang berbeda-beda tentu memiliki nilai dan norma yang beragam pula. Beberapa hal memang merupakan aturan dan kesepakatan yang diakui dan diterapkan secara universal. Namun, tidak sedikit pula hal-hal yang sejatinya khas terdapat dalam suatu kelompok. Misalnya, bagi beberapa kelompok masyarakat pendatang, kebiasaan untuk mengonsumsi minuman beralkohol menjadi sesuatu yang lumrah karena sudah melekat sebagai sebuah ritus budaya turun temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Hanya saja, ketika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan tanpa kontrol yang baik di tanah perantauan, maka potensi terjadinya konflik akan sangat besar. Dalam hal ini, di Yogyakarta termasuk ke dalam kategori kota yang cukup toleran. Selama ritus-ritus budaya tersebut tidak beralih menjadi suatu tindakan yang merugikan dan melanggar hak orang lain, maka berbagai macam kebiasaan yang berbasiskan identitas kultural tersebut sah-sah saja untuk dilakukan, kendati bagi masyarakat lokal Yogyakarta hal tersebut mungkin tidak lazim dan bahkan dilarang dalam adat dan kebudayaan Jawa.

Selain perbedaan nilai dan norma, faktor penyebab munculnya konflik berikutnya adalah persoalan stereotipe dan prasangka. Hampir setiap kelompok etnis di Indonesia memiliki stigma atau stereotipe yang dilekatkan kepada mereka oleh orang di luar kelompok etnis tersebut. KBBI mendefinisikan stereotipe sebagai konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Seringkali karena perilaku buruk segelintir orang dari etnis tertentu, maka terjadi generalisasi bahwa seolah-olah setiap orang dari etnis tersebut mempunyai watak atau sifat demikian. Stereotip menjadi sebuah hal yang

berbahaya karena ia memukul rata kepada seluruh anggota kelompok, sehingga dengan demikian akan mudah menyulut permasalahan oleh karena duga sangka yang tidak tepat kepada orang yang tidak memiliki watak tersebut.

Hal ini beberapa kali terjadi di Kota Yogyakarta. Misalnya saja, muncul suatu anggapan bahwa beberapa mahasiswa maupun perantau yang berasal dari wilayah timur Indonesia sering dianggap tidak disiplin dan tidak taat aturan berlalu lintas. Mereka juga kerap dianggap kurang menjaga higienitas dan kebersihan lingkungan. Atau misalnya beberapa etnis dari wilayah barat Indonesia dianggap memonopoli perdagangan souvenir di kawasan wisata Malioboro. Ada banyak lagi contoh stereotipe yang muncul dan dialamatkan kepada tiap kelompok etnis yang ada. Persoalan ini sendiri bukan khas terjadi di Yogyakarta saja, melainkan di berbagai tempat di seluruh Indonesia yang sangat beragam secara budaya ini. Prasangka seperti ini kemudian kerap menjadi pukul rata kepada siapa saja yang menjadi bagian dari kelompok etnis tersebut, kendati individu tersebut tidak melakukan atau belum tentu memiliki perilaku yang sama dengan yang dialamatkan orang lain kepadanya. Prasangka yang seringkali berangkat dari sempitnya cara berpikir ini apabila tidak dikikis dan dihilangkan maka akan menjadi bahan bakar bagi tersulutnya konflik yang berbasiskan identitas etnis atau kedaerahan. Maka menjadi penting untuk membangun suatu program bersama agar sekat-sekat berupa stereotipe dan prasangka ini dapat dilenyapkan.

Nasional > Peristiwa

Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama

Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia

Minggu, 17 Jul 2016 06:45 WIB

Bagikan:    



Gambar 3. 7 Gambar Cuplikan berita yang mengabarkan tentang pengepungan mahasiswa Papua di asrama mereka oleh sekelompok orang yang terjadi di Asrama Kamasan, Yogyakarta pada 2016. (Sumber: CNN Indonesia, 17 Juli 2016)

Ketegangan antar kelompok berbasis etnis atau kultural ini juga dapat tersulut oleh karena perebutan sumber daya sebagai mata pencaharian. Tidak dapat disangkal bahwasanya beberapa pekerjaan atau area yang digunakan untuk mencari penghidupan ada yang dikuasai kelompok-kelompok dengan basis etnisitas tertentu. Dapat juga beberapa jenis profesi atau pekerjaan juga umumnya dikerjakan oleh orang-orang dari suatu kelompok etnis. Hal ini kadangkala menimbulkan persoalan dan konflik ketika dua kelompok berbeda berusaha memperebutkan sumber daya untuk penghidupan tersebut. Beberapa kali konflik seperti ini terjadi, meski umumnya perselisihan terjadi di antara dua kelompok etnis yang sama-sama merantau ke Yogyakarta. Ketegangan seperti ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah selaku pemegang otoritas dan

kebijakan untuk menanggulangi permasalahan sosial ekonomi yang saling berkaitan dengan isu rasial maupun etnisitas.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan nasional mengalami perkembangan sosial yang sangat dinamis. Keberadaannya yang menarik banyak pelajar, mahasiswa, pekerja, serta pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang sangat plural dalam segi demografi. Keragaman ini mencakup perbedaan bahasa daerah, adat istiadat, perilaku sosial, hingga ritus budaya keagamaan. Dalam konteks kebijakan sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta dihadapkan pada tantangan bagaimana mengelola pluralitas ini agar tetap harmonis, sekaligus meminimalkan potensi konflik yang bisa timbul akibat gesekan antar kelompok masyarakat.

Perbedaan bahasa merupakan salah satu sumber ketegangan yang kerap terjadi di ruang sosial publik Yogyakarta. Masyarakat lokal Yogyakarta, yang umumnya berbahasa Jawa dengan tata krama halus (*unggah-ungguh*), terkadang merasa tidak nyaman dengan penggunaan bahasa Indonesia dialek daerah lain yang dinilai terlalu lugas atau kasar menurut persepsi mereka. Misalnya, pendatang dari wilayah Sumatera atau Indonesia bagian timur yang cenderung menggunakan intonasi suara yang tegas bisa dianggap kurang sopan oleh masyarakat setempat. Dalam forum-forum komunikasi publik, baik di lingkungan pendidikan, dunia kerja, maupun lingkungan permukiman, ketidaktahuan terhadap norma bahasa lokal ini seringkali berujung pada kesalahpahaman antar individu atau kelompok.

Selain bahasa, perbedaan adat istiadat dan perilaku sosial juga berpotensi menjadi pemicu konflik laten. Budaya masyarakat Yogyakarta yang menjunjung tinggi prinsip *tepa selira* (toleransi), *rukun* (kerukunan), serta *ewuh pakewuh* (rasa sungkan) seringkali berbenturan dengan gaya komunikasi sebagian pendatang yang lebih langsung, terbuka, dan ekspresif. Dalam beberapa kasus, perbedaan gaya komunikasi ini telah menimbulkan persepsi negatif satu sama lain, bahkan menjadi bibit ketegangan sosial, khususnya di lingkungan kampus, lingkungan kos, maupun komunitas permukiman campuran. Apalagi bila disertai dengan faktor

ekonomi seperti ketimpangan penguasaan sumber daya oleh pendatang, ketegangan horizontal antar kelompok masyarakat dapat meningkat.

Ritus budaya dan tradisi keagamaan yang berbeda pun dapat memperbesar potensi konflik jika tidak dikelola secara sensitif. Di Yogyakarta, beberapa komunitas pendatang kerap membawa serta budaya ritual dari daerah asal mereka, baik dalam skala kecil seperti perayaan keluarga, hingga skala besar seperti festival keagamaan. Ketika praktik tersebut bersinggungan dengan keterbatasan ruang publik, kebisingan, ataupun penggunaan fasilitas umum tanpa koordinasi yang tepat, ketegangan antar kelompok bisa saja muncul. Misalnya, dalam beberapa laporan lapangan, pernah terjadi protes warga lokal atas penggunaan ruang publik untuk acara keagamaan oleh komunitas pendatang yang dinilai tidak memperhatikan norma lokal (lihat: Triyono, H. "Dinamika Multikulturalisme di Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Sosial*, 2021). Fenomena ini mencerminkan pentingnya penguatan manajemen keragaman budaya dalam tata kelola kota.

Dalam konteks kebijakan publik, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengadopsi strategi pengelolaan keberagaman yang lebih sistematis. Beberapa rekomendasi strategis antara lain: (1) memperkuat program pendidikan multikulturalisme di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat umum; (2) membangun forum dialog antar komunitas lokal dan komunitas pendatang untuk membangun kesepahaman budaya; (3) menata regulasi penggunaan ruang publik agar meminimalisir potensi benturan kepentingan kultural; serta (4) memperkuat kapasitas aparat kelurahan dan kecamatan dalam mediasi konflik berbasis budaya. Upaya-upaya ini penting dilakukan bukan hanya untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga demi menjaga citra Yogyakarta sebagai kota yang ramah, aman, dan harmonis di tengah keragaman.

Dalam beberapa hal, pengaruh sejarah dan trauma dapat mendorong sebuah kelompok untuk terlibat ke dalam suatu konflik yang dilandasi oleh sentimen kultural dan kedaerahan. Misalnya saja, para mahasiswa dan perantau asal Indonesia bagian timur yang seringkali merasa mengalami ketidakadilan oleh pemerintah pusat, kemudian meluapkan dan mengekspresikan kekecewaannya

dalam aksi protes yang mereka lakukan di Kota Yogyakarta. Beberapa kali aksi dan demonstrasi ini mereka gelar sebagai upaya mereka menyuarakan keresahannya. Mereka umumnya memiliki rasa trauma oleh karena operasi militer yang terjadi di daerah asal mereka. Pengungkapan aspirasi ini kemudian dilakukan di tempat mereka sedang menimba ilmu. Namun, seringkali aksi-aksi ini menuai antipati dari masyarakat lokal yang seringkali masih belum dapat memahami ekspresi kekecewaan dan trauma yang mereka para mahasiswa perantau tersebut alami. Sehingga seringkali sentimen negatif muncul, baik secara langsung di lokasi maupun komentar dan unggahan di media sosial. Maka, menjadi penting untuk mengelola dan menyelesaikan problem ini sehingga kelak konflik dan kekerasan tidak akan terjadi lagi.

Perbedaan agama sering dimanfaatkan sebagai alat politik identitas. Misalnya, kasus penolakan rumah oleh Slamet Jumiarto dan keluarganya di Bantul (2019), yang didasarkan pada aturan lokal menyatakan pendatang harus beragama Islam. Demikian pula, pelarangan berdirinya gereja di Sedayu dan situasi intoleransi terhadap makam Kristen di Kotagede menunjukkan bagaimana kelompok mayoritas menggunakan simbol agama sebagai alat pengecaman. Akhirnya, masyarakat merasa “terancam” dan menggunakan agama sebagai pembenaran superioritas kelompok.

Yogyakarta, yang dulu dikenal sebagai “City of Tolerance”, kini menunjukkan penurunan toleransi: dari zona merah di Indeks Toleransi 2017 menjadi oranye pada 2018. Analisis oleh UGM dan Setara Institute menyoroti bahwa budaya toleransi mulai memudar, sebagian karena munculnya pemukiman dan aturan eksklusif berbasis agama. Isu segregasi seperti perumahan syariah di Bantul memperkuat jarak sosial antar kelompok.

Kasus penyerangan gereja, pemotongan salib makam, pembubaran kegiatan keagamaan, serta penutupan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah (2016) menunjukkan kelompok garis keras yang sering tidak mendapat tindakan tegas dari aparat. UGM melihat keterlibatan FUI, FJI, serta HTI dan MMI, yang secara aktif menyuarakan intoleransi. Lemahnya respons aparat dan pemerintah daerah mendorong keberanian kelompok radikal untuk terus beraksi.

Konflik antar kelompok agama tak hanya lintas agama, tapi juga terjadi antar golongan dalam agama yang sama. Misalnya, kekerasan terhadap Pondok Pesantren Waria Al-Fatah didorong oleh konservatisme internal Islam. Bahkan di kalangan Kristen, penolakan peresmian kantor Klasis muncul karena kecemasan munculnya komunitas agama lain. Fragmentasi ini memperburuk cara komunitas minoritas untuk bersuara dan bersatu.

Pendidikan berbasis nilai Pancasila dan moderasi beragama harus diperkuat di sekolah dan pesantren. Pemerintah daerah, terutama Gubernur dan Sri Sultan, perlu aktif mengawal nilai kebinekaan dan mengundang dialog antaragama rutin. Aparat keamanan harus memberikan respons cepat dan adil terhadap setiap bentuk intoleransi, serta mengadili pelaku intoleransi tanpa pandang bulu. Ini penting untuk menghentikan pola aksi vigilante dan radikalisme.

Umat dari berbagai agama perlu membangun jejaring solidaritas, saling mendukung dalam pendirian tempat ibadah, serta menjalin "early warning system" untuk kasus intoleransi. Dukungan antar komunitas dapat memperkuat tekanan moral dan hukum. Sultan, pemuka agama, serta tokoh masyarakat harus tampil sebagai contoh moderat, menegaskan keadilan dan hak setiap warga tanpa diskriminasi. Setara Institute bahkan menyerukan peran aktif Sultan HB X dalam membela minoritas.

Dengan langkah terpadu antara pendidikan berbasis toleransi, penegakan hukum, jejaring keagamaan, dan kepemimpinan moral, Yogyakarta dapat kembali menegaskan reputasinya sebagai kota yang damai, rukun, dan harmonis, di mana perbedaan agama dan keyakinan menjadi sumber kekuatan, bukan konflik.

Globalisasi dan modernisasi telah mendatangkan gelombang pendatang—pelajar, wisatawan, dan pekerja dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Misalnya, Yogyakarta sebagai "Kota Pelajar" menjadi magnet ribuan mahasiswa dari wilayah seperti Papua, NTT, Maluku, bahkan asing. Interaksi ini membawa keanekaragaman, namun juga stereotipe dan prasangka, seperti konflik antarpemuda dari Maluku vs NTT pada Juli 2022 yang menimbulkan bentrokan serta pembakaran motor di Babarsari-Seturan. Faktor modernitas—

semisal gaya hidup yang berbeda, musik keras, penggunaan bahasa asing—juga memperuncing ketegangan budaya dan identitas.

Modernisasi ekonomi dan ekspansi ruang kota (hotel, mal, perumahan modern) telah mengubah lanskap sosial. Kehadiran perumahan syariah dan hunian eksklusif memicu fragmentasi sosial karena terciptanya komunitas yang kental identitas dan eksklusivitasnya, sehingga perasaan saling curiga muncul di antara dua kelompok pemukim di satu kawasan. Sementara itu, tatanan tradisional seperti “paugeran” Kesultanan dan perguliran putra-putri keraton menghadapi tekanan tuntutan keterbukaan gender dan sosial, seperti inisiatif penunjukan putri sebagai pewaris tahta, yang memicu kritik dari pihak tradisional. Perubahan ini menimbulkan konflik internal bahkan persoalan struktur elite keraton yang berimplikasi pada persepsi publik atas legitimasi budaya.

Perubahan sosial pesat dan urbanisasi meningkatkan nilai tanah secara signifikan, memicu konflik lahan antara warga lokal dan pihak pengembang. Contohnya di Sosrokusuman, konflik sengketa antara warga dengan PT Bangun Jogja Indah terjadi karena regulasi lemah dan tumpang tindih penggunaan tanah, melibatkan aspek sertifikat, fungsi sosial dan kompensasi CSR. Kasus lain terkait pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo menimbulkan resistensi warga akibat ganti rugi dan pencabutan mata pencaharian, memunculkan organisasi penolak dan intervensi Ombudsman juga Komnas HAM.

Penelitian di Kampung Ketandan dan Pringgokusuman menunjukkan bahwa pluralitas dapat dikelola melalui pendekatan toleransi budaya, nilai kekeluargaan, dan kepemimpinan lokal yang kuat. Pemerintah Kota juga aktif mengadakan "Sinau Pancasila" di kelurahan untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan meredam intoleransi sosial. Beberapa rekomendasi konkret mencakup: (1) memperkuat manajemen konflik berbasis lokal (musyawarah, mediasi), (2) meningkatkan literasi sosial dan pelembagaan dialog antarbudaya, (3) memperbaiki regulasi pertanahan dan transparansi kompensasi, serta (4) memperkuat peran institusi budaya (Keraton) sebagai mediator sosial guna menjaga keseimbangan tradisi dan modernitas. Pendekatan ini, jika konsisten

dijalankan, dapat menjaga Yogyakarta tetap damai, rukun, dan harmonis meski dihadapkan pada dinamika globalisasi dan modernisasi.

3.4. Praktik Baik dan Inisiatif Lokal dalam Membangun Dialog Budaya

Sebagai kota yang dikenal sebagai kota dengan sejuta event atau kegiatan budaya, Kota Yogyakarta memiliki banyak sekali agenda kebudayaan yang lahir dari akar rumput itu sendiri alias datang dari inisiatif dan kesadaran warga kota. Berbagai usaha pemajuan dan pengembangan kebudayaan ini dilakukan secara mandiri dan swadaya, bergantung pada minat dan konsentrasi dari para pelaksananya. Namun, tidak sedikit yang kemudian mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kota guna mengakomodir dan semakin mengembangkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang lahir dari masyarakat itu sendiri.

Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY 2024 – “Umpak Buka”) menjadi salah satu contoh penting revitalisasi budaya material dan non-material. Selain memamerkan artefak dan benda warisan seperti umpak, festival ini juga menyajikan praktik lokakarya, eksplorasi istilah budaya, dan kegiatan pramuka untuk menelusuri kembali memori kolektif masyarakat Bantul.

Tak kalah menarik adalah Festival Bregada Rakyat, yang mempertemukan kelompok bregada (semacam barisan prajurit tradisional) dari desa-desa. Festival ini rutin sejak 2014, didukung Dinas Kebudayaan DIY, dan memberi penghargaan untuk inovasi kostum, gendhing, dan koreografi, memperkuat rasa identitas dan disiplin budaya.

Di Yogyakarta terdapat lembaga seperti Taman Budaya Yogyakarta dan Bentara Budaya Yogyakarta. Taman Budaya yang dibuka di Societet Militaire menyelenggarakan pameran seni rupa, tari, musik, dan kerajinan secara rutin. Sedangkan Bentara Budaya sejak 1982 menjadi pusat kesenian untuk pemutaran film, konser, dan diskusi budaya.

Di samping galeri, terdapat juga forum rutin “Dialog Budaya Yogya untuk Semesta” diselenggarakan Komunitas Yogya untuk Semesta setiap Selasa Wage. Forum ini membahas kaitan antara budaya sehari-hari warga (bersih, tertib,

ramah) dengan citra pariwisata, serta peran museum sebagai agen hidupnya budaya.

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dari Kemendikbud telah rutin mengundang mahasiswa dari luar pulau untuk belajar langsung kebudayaan lokal. Kegiatan ini meliputi kunjungan ke Keraton, Tamansari, Museum Sonobudoyo, praktik membatik, tari, karawitan, serta kuliner khas gudeg dan bakpia. Modul budaya ini sengaja didesain untuk membangun sikap toleransi, nasionalisme, dan soft-skill kebhinekaan.

Inisiatif serupa dilakukan oleh universitas seperti UNU Yogyakarta yang mengadakan ASEAN IIDC Cultural Visit (4–5 Agustus 2023), di mana tokoh lintas agama dari negara ASEAN diajak mengkaji dan menghargai peninggalan budaya seperti Candi Borobudur sebagai upaya dialog antarbudaya dan agama.

Yogyakarta sering dijuluki “City of Tolerance” dan dirangkul oleh organisasi internasional seperti KAICIID dan Kemenag untuk menjadi tuan rumah dialog antar-kota dan antar-faith. Misalnya, dalam KAICIID Dialogue Cities (28–30 Mei 2023), DIY mengirim tim akademisi, birokrat, penyuluh agama, dan praktisi lintas iman untuk membagikan praktik kerukunan lokal di Bangkok.

Juga, gelaran Dialog Lintas Agama menjelang Natal & Tahun Baru (Desember 2023) diinisiasi PKUB-Kemenag DIY dengan melibatkan tokoh dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, hingga aliran tradisional. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) rutin sejak 1970-an, membahas isu mendirikan tempat ibadah, perkawinan beda agama, hingga toleransi perayaan hari besar.

Sejak 2017, Komunitas Sant’Egidio menyelenggarakan “Dialog Lintas Iman-Budaya dan Doa untuk Perdamaian” yang melibatkan para muda lintas agama – dari Buddha, Katolik, Muslim, Hindu, Bahai, Ahmadiyah, hingga organisasi masyarakat sipil – bertutur: “Menjadi jembatan artinya harus bisa menghapus dan meretas sekat di antara kita”.

Even yang kembali menegaskan kehidupan budaya adalah Dialog Budaya Yogyakarta: Quo Vadis di Era Modernitas pada 21 September 2024 di Jakarta, melibatkan diaspora, arsitek, dan praktisi seni untuk mendiskusikan pelestarian

sumbu filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO, dan tantangan memodernisasi bangunan masyarakat tanpa menghilangkan pakem tradisional. Ini menunjukkan kesadaran bahwa pengembangan kota dan diaspora tetap menjunjung nilai-nilai budaya lokal, bahkan saat menghadapi globalisasi dan arus modernitas.

Secara keseluruhan, Yogyakarta konsisten membangun ekosistem budaya harmonis melalui berbagai inisiatif bottom-up seperti festival, pendidikan seni budaya inklusif, dialog lintas agama dan budaya, serta musyawarah *multi-stakeholder*. Integrasi ini tidak hanya memperkuat identitas lokal dan toleransi internal, tetapi juga memproyeksikan Yogyakarta sebagai laboratorium kebudayaan berbasis nilai, yang dicontohkan oleh komunitas diaspora dan organisasi internasional.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH

4.1. Tinjauan atas Kebijakan yang Ada

Pada dasarnya, berbagai kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dari kehadiran peserta yang selalu semarak, keterlibatan masyarakat yang juga cukup tinggi, sampai pada sebaran informasi dan publikasi kegiatan yang juga menggema di banyak tempat, khususnya melalui lini media sosial. Hanya saja, tetap ada beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan program kebudayaan yang telah diselenggarakan selama ini.

Salah satu masukan yang dilontarkan berkaitan dengan program yang telah ada yaitu bahwa sasaran dari tiap kegiatan yang diselenggarakan mesti lebih spesifik lagi. Selama ini program-program yang ada pada dasarnya memang membebaskan siapapun untuk turut serta tanpa terkecuali. Namun terkadang informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masih kurang tersebar dengan luas, sehingga cakupan peserta dapat dikatakan masih terbatas, utamanya pada mereka yang berasal dari Pulau Jawa saja. Padahal salah satu tujuan dari program-program ini adalah menjangkau secara lebih luas partisipasi dan keterlibatan dari peserta yang jauh lebih beragam secara kultural maupun asal daerah. Apalagi mengingat bahwa Kota Yogyakarta dihuni oleh banyak para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang menempuh pendidikan maupun bekerja dan mencari penghidupan di kota ini.

Artinya, ketika program-program yang ada dapat melibatkan peserta yang jauh lebih beragam dan majemuk, maka tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan kearifan lokal khas Yogyakarta kepada publik yang lebih luas dapat tercapai. Hal ini tentu saja nantinya akan dapat berdampak baik bagi usaha meretas dan memecahkan berbagai problem sosial yang selama ini timbul akibat perbedaan etnisitas maupun kultural. Jadi perlu dipikirkan suatu metode yang jauh lebih efektif untuk dapat menjangkau keterlibatan yang lebih luas, utamanya dari para

mahasiswa daerah yang merantau di Kota Yogyakarta, untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan ini. Tidak dapat dimungkiri bahwa banyak dari mereka selama ini datang dan merantau ke Kota Yogyakarta sebatas untuk menempuh pendidikan saja. Interaksi dan pengetahuan mereka akan nilai, norma, dan kearifan lokal Kota Yogyakarta seringkali terabaikan ataupun bukan menjadi prioritas penting. Maka harapannya, dengan program dan kegiatan yang lebih menarik, mereka dapat tergerak untuk dapat mengikuti dan belajar dari acara yang diselenggarakan oleh dinas kebudayaan tersebut.

4.2. Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dari berbagai macam gelaran acara yang telah diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sepanjang 2024 lalu misalnya, pada dasarnya semua telah berjalan dengan baik dan menunjukkan progres yang bagus, terutama pada masa setelah pandemi mewabah sejak 2020 lalu. Evaluasi yang disampaikan di sini kemudian didasarkan pada LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada 2024 silam. Tidak semua program akan dibahas di sini, melainkan beberapa program saja yang sekiranya relevan untuk dijadikan sampel.

Sebagai permulaan, misalnya Program Sapa Budaya dapat disebut telah mencerminkan langkah inovatif: sebuah aplikasi serta forum diskusi (FGD) yang dirancang sebagai ruang interaksi, jejaring, dan kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, serta masyarakat. Secara strategis, langkah ini berhasil meningkatkan akses pelaku terhadap fasilitas digital dan nomor induk budaya melalui Jogja Smart Service (JSS), memperkuat manajemen dan kolaborasi lintas *stakeholder*. Namun, evaluasi efektivitas dukungan seperti peningkatan kualitas pementasan, publikasi karya, dan penetrasi terhadap kelompok yang kurang terdigitalisasi, belum terdokumentasi secara terbuka dalam laporan kinerja tahunan yang disebutkan di atas. Meski pelaksanaan FGD dan platform digital terasa relevan, minimnya data capaian konkret (misalnya jumlah pengguna aktif, dampak ekonomi bagi pelaku, atau peningkatan kekayaan budaya terdata) membuat evaluasi masih bersifat indikatif, bukan terukur.

Selain itu, kegiatan pemajuan heritage lewat Kotabaru Heritage Film Festival yang diselenggarakan sejak 2023, ditandai peningkatan skala: dari antusiasme 171 pendaftar se-Indonesia hingga penambahan rangkaian seperti Sinema Berdansa dan Pasar Kobar dengan melibatkan 31 Rintisan Kelurahan Budaya. Festival ini efektif menanamkan kesadaran heritage melalui medium film dan *urban cultural activation*, sekaligus mendukung pelaku kuliner lokal via kolaborasi langsung pada saat pelaksanaan acara. Namun kemudian, tinjauan kritisnya adalah kelanjutannya masih tergantung event tahunan: apakah dampak budaya dari festival tersebut dapat terintegrasi lebih luas ke masyarakat sehari-hari, ataukah hanya bersifat insidental semata. Dalam hal ini, perlu diakses dan ditelusuri lebih lanjut untuk memverifikasi indikator keberhasilan seperti jangkauan peserta, kualitas karya, atau kontribusi terhadap sektor ekonomi kreatif.



Gambar 4. 1 Gambar Penyelenggaraan Kotabaru Heritage Film Festival 2024 yang berusaha untuk mengakomodasi berbagai macam latar belakang kultur di Indonesia ke dalam medium film. (Sumber: jogjakota.go.id)

Maka kemudian, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta juga perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan menyertakan indikator terukur dalam laporan kinerja tahunan yang mereka sampaikan, misalnya: jumlah

pengguna aktif Sapa Budaya, kolaborasi lintas sektor yang dihasilkan, jumlah penonton dan karya terpilih KHFF, dampak ekonomi langsung bagi peserta RKB dan UMKM. Hal ini akan memberi landasan evaluasi yang lebih objektif, menggantikan dominasi narasi keberhasilan program dengan data empiris yang kuat.



Gambar 4. 2 Gambar Rintisan Kelurahan Budaya di Kelurahan Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta. Rintisan Kelurahan Budaya ini nantinya dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan Jawa di tengah situasi modernisasi dan globalisasi seperti sekarang. (Sumber: Kelurahan Notoprajan)

4.3. Peran Pemerintah Daerah, Lembaga Budaya, dan Masyarakat

Dari sekian banyak penyelenggaraan program dan kegiatan kebudayaan, yang dalam hal ini berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dapat disebut bahwa berbagai macam program yang ada tersebut sudah berjalan dengan cukup baik. Dari segi penyelenggaraan, skala kegiatan, keterlibatan dan partisipasi warga, sampai jangkauan acara juga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yang mana hal tersebut dapat dilihat sekilas melalui semarak dan ramainya setiap acara yang digelar. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada catatan kritis sama sekali dari berbagai penyelenggaraan yang telah dilakukan tiap tahunnya tersebut. Terutama sekali mengenai keterlibatan dari setiap elemen yang penting untuk ditinjau sebagai bagian dari perbaikan program di masa mendatang.

Pertama, peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara, pemilik otoritas, sekaligus fasilitator bagi setiap program yang dijalankan. Pada dasarnya, program-program yang ada sudah sedapat mungkin menjangkau, melibatkan, dan memfasilitasi setiap kalangan untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan dan jalannya program. Hanya saja, masih perlu ditingkatkan lebih jauh bagi pemerintah daerah untuk dapat menjangkau mereka yang berasal dari latar belakang kultural yang berbeda yang juga tinggal menetap dalam beberapa waktu di Yogyakarta. Memang pada dasarnya kepentingan utama pemerintah kota adalah untuk melayani kebutuhan warga masyarakat lokal itu sendiri yang menjadi subjek utama bagi setiap kegiatan-kegiatan dan program pemerintah. Dalam realitanya, hal ini juga telah dipenuhi oleh pemerintah kota dengan baik sehingga angka partisipasi masyarakat lokal dapat disebut cukup tinggi. Namun oleh karena ini adalah program pemajuan dan pengembangan kebudayaan yang salah satunya membutuhkan keterlibatan dari mereka yang secara normatif adalah kelompok pendatang, maka penjangkauan terhadap mereka perlu mendapatkan perhatian khusus.

Selain itu, yang juga penting dan mendesak untuk dilakukan dan disediakan oleh pemerintah kota adalah penambahan ruang-ruang budaya yang lebih terbuka, cair, dan dapat diakses oleh publik secara mudah, murah, dan ramah.

Keberadaan ruang budaya yang nantinya sekaligus menjadi ruang terbuka hijau ini penting guna memfasilitasi kebutuhan ruang ekspresi diri dan budaya bagi masyarakat secara umum. Selama ini banyak dari mereka yang merasa bahwa ruang-ruang budaya yang ada masih terbatas, entah itu karena bentuk ruangnya formal, berbayar mahal, terbatas pada kepemilikan pribadi, maupun hal-hal lain yang pada akhirnya membuat banyak dari mereka, terutama orang-orang muda, melakukan ekspresi diri dan budaya yang menyalahi dan melanggar aturan dan ketertiban umum. Persoalan inilah yang kiranya dapat dipecahkan dan diselesaikan oleh pemerintah kota mengingat kebutuhan akan ruang-ruang budaya yang aman, inklusif, dan terbuka amat dibutuhkan terutama oleh generasi muda yang sedang dalam fase bersemangat mengekspresikan dirinya melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan maupun kesenian.



Gambar 4. 3 Gambar Perhelatan Jogja Cross Culture yang diselenggarakan di Jalan Malioboro, Yogyakarta pada 25 Mei 2024 sebagai salah satu program andalan dalam pengembangan kebudayaan di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. (Sumber: jogjakota.go.id)

Selain peran pemerintah daerah, keberadaan lembaga budaya juga mesti didorong untuk memberikan sumbangsih dalam hal pemajuan dan pembangunan

kebudayaan. Sejatinya, tanpa perlu didorong saja mereka sudah banyak melakukan inisiatif dan kerja-kerja kebudayaan di lingkup yang biasanya kecil, lokal, dan mengakar di sekitar tempat mereka tinggal dan melakukan kerja kebudayaan. Kota Yogyakarta sendiri dihuni oleh banyak sekali para pegiat kebudayaan, dengan segala bidang kebudayaannya masing-masing yang tersebar di seantero kota. Selama ini mereka bergerak secara swadaya alias mandiri untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan, produksi karya, sampai pertunjukan bagi masyarakat umum. Selain sebagai sarana pengembangan diri para pekerja kebudayaan itu sendiri, banyak dari mereka juga melakukannya untuk mendorong pemajuan kebudayaan pada masyarakat sekitar tempat mereka tinggal.



Gambar 4. 4 Gambar Perhelatan Festival Ketoprak Yogyakarta yang mengambil lakon sejarah Kerajaan Mataram yang dipentaskan pada 2022 lalu. Festival ini adalah salah satu program di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk terus melestarikan kebudayaan panggung khas Yogyakarta, dengan melibatkan tiap kemandren untuk tampil sebagai peserta. (Sumber: jogjakota.go.id)

Maka dengan demikian, dorongan dan dukungan konkret pemerintah kota dapat membantu mereka untuk lebih jauh lagi melakukan kerja-kerja kebudayaan di tingkat akar rumput. Peran mereka cukup vital karena banyak membantu

pemerintah kota yang tentunya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya jika harus menjangkau secara keseluruhan elemen masyarakat guna mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan pengembangan kebudayaan. Maka salah satu hal penting yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah kota memberikan beberapa fasilitasi yang cukup bagi lembaga-lembaga budaya yang ada, baik melalui dukungan moril maupun materiil sehingga kerja-kerja di tingkat akar rumput akan dapat berjalan semakin maksimal.

Terakhir, masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya kebudayaan juga mesti turut aktif berperan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun atas inisiatif lembaga-lembaga budaya yang ada. Sejauh ini kegiatan-kegiatan yang ada memang sudah dapat menjangkau dan melibatkan masyarakat lokal Kota Yogyakarta itu sendiri untuk berpartisipasi aktif di dalamnya. Sebut saja program Kampung Menari, Jogja Cross Culture, Gelar Budaya Jogja, Festival Ketoprak Jogja, dan sederet kegiatan-kegiatan kebudayaan lainnya sudah diisi secara aktif oleh masyarakat lokal itu sendiri. Partisipasi aktif warga lokal ini akan semakin lengkap lagi apabila komunitas masyarakat pendatang yang ada di Kota Yogyakarta juga dapat terlibat aktif di dalamnya. Inilah yang nantinya menjadi tugas dari pemerintah kota untuk memastikan mereka dapat terlibat pula sebagai subjek acara, sehingga tujuan untuk membangun jembatan budaya dan interaksi sosial di antara beragam kultur yang ada di Yogyakarta dapat berlangsung dengan baik.



Gambar 4. 5 Gambar Program Kampung Menari menjadi salah satu program andalan dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Gambar di atas menunjukkan pelaksanaan Kampung Menari yang digelar di Embung Giwangan pada 9 Juni 2024 lalu. (Sumber: jogjakota.go.id)

4.4. Gap Analisis antara Kebutuhan dan Respons Kebijakan

Berdasarkan dokumen LKIP dan realisasi kegiatan hingga Juli 2024 oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, terdapat beberapa gap antara kebutuhan masyarakat di bidang kebudayaan dengan respons kebijakan, yang dapat dirangkum dalam empat poin utama berikut:

Pertama, gap dalam pelestarian dan tata kelola cagar budaya. Masyarakat membutuhkan perlindungan kuat terhadap cagar budaya di area permukiman bersejarah seperti Kotagede dan Purbayan. Meskipun terdapat kegiatan berupa dokumen rekomendasi dan upaya pengembangan, jumlah rehabilitasi dan penyelamatan fisik cagar budaya masih terbatas, hanya satu kegiatan rehabilitasi dengan dua sub-kegiatan. Artinya, meskipun ada niat kebijakan, skala dan intensitas pelaksanaannya belum menjawab ekspektasi perlindungan heritage yang dirasakan masyarakat.

Kedua, gap antara digitalisasi data budaya dan partisipasi warga. Masyarakat secara aktif meminta akses data naskah kuno, ritual, dan narasi lokal.

Pemerintah telah memulai pengembangan sistem informasi dan aplikasi budaya namun baru satu kali pemeliharaan aplikasi/sistem informasi. Ini berarti respons kebijakan belum cukup cepat untuk mendorong digitalisasi dan keterbukaan data secara menyeluruh. Tingkat partisipasi publik dalam forum diskusi dan FGD memang tinggi (18 forum/14 pertemuan), namun belum ada indikator digital engagement yang signifikan.

Ketiga, pengembangan budaya komunitas dan event lokal. Program BKK (Bursa Kebudayaan Kawasan) mendukung kampung budaya – seperti kampung berkat, prenatal, dan Rumah Jagawarga – menunjukkan respons terhadap kebutuhan ekspresi budaya lokal. Tercatat beberapa realisasi besar seperti BKK Desa Mandiri Budaya sebanyak 24 kegiatan, dan BKK Rumah Jagawarga 28 kegiatan. Namun, keberlanjutan ekonomi kreatif dalam komunitas ini masih perlu ditingkatkan, agar tidak hanya sekedar event sesaat tapi berefek jangka panjang bagi kesejahteraan komunitas.

Terakhir, sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Kebutuhan masyarakat terhadap fasilitasi pelatihan dan pendidikan budaya tidak sepenuhnya terpenuhi. Meskipun ada pelatihan museum (3 kegiatan), workshop (9), dan pelatihan manajemen (1), total pelatihan kurang dari 20 acara dalam setahun. Di sisi lain, jumlah kegiatan event seperti pentas seni (28) dan festival (24) cukup tinggi. Hal ini menunjukkan prioritas masih pada penyelenggaraan kegiatan, sementara peningkatan kapabilitas SDM pelaku budaya dan pengelola lokal masih terbatas.

Maka pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa masih terdapat gap struktural antara kebutuhan masyarakat, terutama terkait perlindungan cagar budaya, digitalisasi data, keberlanjutan ekonomi budaya komunitas, dan peningkatan kapasitas SDM, dengan output kebijakan nyata dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Meski program dan event budaya sangat banyak, intensitas rehabilitasi fisik heritage dan pengembangan sistem digital masih kurang. Kedepannya, perlu penajaman pada tiga aspek: memperluas skala pelestarian heritage, membrantas gap digitalisasi data budaya, dan memperkuat pembangunan skill ekonomi kreatif dan SDM lokal melalui pelatihan berkesinambungan.

Dari dokumen yang sama kemudian dapat diambil setidaknya empat poin besar yang dapat menjadi saran bagi perbaikan ke depannya. Pertama, prioritaskan skema rehabilitasi dan perlindungan cagar budaya permukiman. Masih minimnya intensitas rehabilitasi cagar budaya khususnya di kawasan padat warisan seperti Kotagede, Purbayan, Kauman, dll. menunjukkan perlunya penyusunan rencana induk konservasi kawasan heritage berbasis zonasi mikro. Selain itu juga mesti dilakukan penguatan kolaborasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), komunitas lokal, arsitek konservasi, serta pelibatan aktif pemilik rumah cagar budaya melalui skema insentif pajak atau bantuan teknis rehabilitasi ringan. Perluasan program pendampingan teknis konservasi berbasis kampung juga mesti dilakukan. Kebijakan ini penting agar masyarakat pemilik cagar budaya tidak terbebani biaya pemeliharaan pribadi, serta mengurangi risiko hilangnya fisik bangunan bersejarah akibat keterbatasan ekonomi.



Gambar 4. 6 Gambar Masjid Gedhe Kauman beserta Kampung Kauman di sisi belakangnya yang menjadi salah satu kawasan bernilai historis yang menjadi saksi bagi jalannya sejarah Kota Yogyakarta. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan pengembangan kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta. (Sumber: muhammadiyah.or.id)

Kedua, percepat digitalisasi data kebudayaan secara terbuka dan terintegrasi. Salah satu gap yang mulai terasa adalah minimnya data digital publik

mengenai inventaris budaya. Dinas sebaiknya memperluas pengembangan database budaya daring yang dapat diakses publik, melibatkan perguruan tinggi lokal (UGM, ISI, Sanata Dharma, dll.) sebagai mitra pengumpulan data, digitalisasi naskah kuno, ritual, adat, dan ekspresi budaya lokal. Selain itu juga mesti didorong pengembangan aplikasi berbasis komunitas (*community-based cultural mapping*) agar warga dapat turut serta memperbarui data. Langkah ini akan memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi data budaya, dan memperkuat peran teknologi sebagai alat pelestarian modern.

Ketiga, perluas skema pengembangan kapasitas SDM pelaku budaya dan komunitas. Agar efek penguatan budaya tidak sekadar seremonial, perlu meningkatkan frekuensi pelatihan keterampilan budaya, manajemen komunitas budaya, serta pengelolaan event. Perlu juga dikembangkan program "Sekolah Budaya Kota" sebagai platform pembelajaran informal bagi pegiat budaya lintas usia. Melalui hal tersebut harapannya akan mampu memberikan fasilitasi inkubasi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, agar komunitas mampu mengelola kegiatan budaya sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan. Dengan langkah ini, ekosistem budaya menjadi lebih resilien karena pelaku lokal berdaya secara teknis dan finansial.

Terakhir, kembangkan indikator *outcome* kebijakan budaya. Selama ini banyak indikator masih bersifat output (jumlah kegiatan), sementara perlu disusun indikator dampak berbasis partisipasi warga, kepuasan masyarakat, penguatan identitas lokal, hingga keberlanjutan ekonomi budaya. Survei persepsi masyarakat tentang kebermanfaatan kebijakan budaya sebaiknya dilakukan secara rutin untuk mendapatkan feedback faktual dari bawah. Dengan demikian, pengambilan kebijakan menjadi berbasis data empiris, bukan sekadar formalitas laporan.

Kebijakan ke depan sebaiknya tidak hanya memperbanyak kegiatan seremonial, melainkan mengarah pada *deep cultural governance*: penguatan konservasi heritage, modernisasi digital data budaya, pembangunan kapasitas komunitas, serta pemantauan keberlanjutan dampak kebijakan secara terukur.

BAB V

STRATEGI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Strategi Penguatan Interaksi Budaya yang Inklusif

Berkaca dari program atau kegiatan yang sudah ada, yang dilakukan terutama oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan penguatan interaksi antar budaya di Kota Yogyakarta, rekomendasi kebijakan dan strategi yang disampaikan di sini pada dasarnya tidak begitu jauh berbeda. Pendekatan melalui kegiatan-kegiatan budaya yang dijalankan secara berkala ataupun periodik tetap menjadi prioritas utama. Selain ditujukan untuk merekatkan antar berbagai macam kelompok masyarakat yang ada terutama antara warga lokal dengan masyarakat pendatang, keberadaan program dan kegiatan juga berfungsi sebagai daya tarik pariwisata sekaligus menyemarakkan kegiatan budaya.

Hanya saja, ada dua hal yang kemudian membedakan tawaran program-program yang sekarang dengan yang telah ada dan dijalankan selama ini. Pertama, keterlibatan secara aktif dan partisipatif dari berbagai kelompok pendatang dalam kegiatan-kegiatan dan peristiwa budaya yang diselenggarakan. Kedua, mendorong warga lokal untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan lain dari berbagai daerah di Indonesia yang ada di Yogyakarta. Dua hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang secara nyata dan konkret dapat terasa langsung, memberikan perkembangan signifikan guna menjadikan berbagai kegiatan dan peristiwa budaya semakin merekatkan antar warga yang berlainan latar belakang kultural.

Keterlibatan aktif dan partisipatif kelompok pendatang, dalam hal ini dapat diwakili oleh para pelajar dan mahasiswa maupun organisasi kedaerahan lainnya, menjadi isu krusial yang selama ini agak terabaikan. Dalam berbagai perhelatan sebelumnya, rata-rata mahasiswa luar daerah hanya sebatas sebagai panitia penyelenggara semata. Keterlibatan mereka terbatas hanya di belakang layar saja. Maka ke depan, diharapkan mereka dapat turut serta aktif berpartisipasi sebagai subjek dari sebuah program atau peristiwa budaya yang diselenggarakan.

Ketika ruang dan panggung yang lebih besar diberikan kepada mereka untuk terlibat aktif, maka potensi untuk saling belajar di antara komunitas dengan latar belakang kultural yang beragam dapat semakin membesar.

Di sisi lain, masyarakat lokal yaitu warga Yogyakarta sendiri juga mesti diajak untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan lain yang tumbuh berkembang dibawah oleh para pendatang yang menetap di sini. Selama ini yang terjadi adalah kelompok pendatang yang diminta dan ditekankan untuk mempelajari kebudayaan setempat. Tentu saja ini bukanlah hal keliru, dan pada umumnya memang demikian, terutama selama ini berkembang falsafah “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Pada praktiknya, meski belum seluruhnya, para pendatang juga telah banyak belajar mengenai kebudayaan Yogyakarta itu sendiri. Maka menjadi penting bagi warga lokal untuk turut pula mempelajari kebudayaan dari berbagai komunitas pendatang yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan mempelajari beragam kultur yang ada dari berbagai kelompok pendatang, maka rasa saling pengertian dan toleransi dapat terbangun, dengan batas-batas toleransi dan kompromi yang dapat dipertimbangkan oleh dua pihak yang berbeda. Ringkasnya, dengan saling mempelajari kebudayaan satu sama lain, maka komunikasi antar budaya dapat terbangun dengan baik sehingga akan meminimalisir konflik atau ketegangan yang terjadi sebagai akibat stigmatisasi atau kecurigaan yang terbangun karena perbedaan budaya.

5.2. Rekomendasi Program/Kegiatan Prioritas

Menilik riwayat panjang Kota Yogyakarta dengan kekayaan nilai budaya dan sejarah yang dimilikinya, maka rekomendasi program dan kegiatan prioritas yang diajukan dalam kajian ini menggunakan basis kebudayaan, sejarah, dan heritage sebagai fondasi bagi program yang ditawarkan. Pendekatan melalui tinggalan cagar budaya dan warisan budaya dapat dijadikan jembatan untuk membangun interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat yang beragam kultur tersebut. Sehingga dengan demikian berbagai macam ketimpangan, konflik, maupun gesekan yang berpotensi terjadi oleh sebab perbedaan budaya,

paradigma, maupun kebiasaan dari bermacam-macam kelompok ini dapat diminimalisir.

1) Jelajah Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Heritage)

Salah satu ciri khas dan keunikan Kota Yogyakarta yang tidak banyak dimiliki kota-kota lain di Indonesia adalah keberadaan situs cagar budaya yang jumlahnya amat melimpah. Hampir di setiap titik kota, di tingkat kelurahan maupun kemantren, terdapat banyak bangunan, situs, struktur, maupun kawasan yang masuk dalam kategori cagar budaya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Kasultanan Yogyakarta yang berdiri semenjak abad ke-18, dan bahkan jika ditarik lebih jauh lagi sejak Kerajaan Mataram Islam yang sudah eksis sejak abad ke-16 dan menempati wilayah yang kini masuk menjadi bagian dari Kota Yogyakarta.

Tentu saja situs-situs cagar budaya ini tidak hanya sebagai sebuah artefak masa lalu yang statis dan tanpa makna. Berbagai cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta ini masing-masing memiliki kisah, cerita, bahkan nilai yang terkandung di dalamnya. Ia tidak diam sekadar sebagai benda mati yang tidak memiliki relevansinya untuk masa kini. Dengan pengetahuan yang disusun dari arkeolog untuk menjelaskan secara fisik dan sejarawan untuk memberikan pemaknaan situs masa lalu untuk masa kini dan masa mendatang, berbagai warisan budaya yang ada di Kota Yogyakarta ini dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus penanaman nilai-nilai khas Yogyakarta.

Program Jelajah Cagar Budaya dan Warisan Budaya ini dikemukakan untuk menjadi jembatan bagi tumbuhnya pengetahuan sejarah, nilai-nilai budaya, dan penanaman jati diri Yogyakarta kepada mereka yang ingin tahu dan mempelajari dengan lebih mendalam apa itu nilai dan budaya Yogyakarta. Program ini diajukan mengingat bahwa banyaknya pendatang yang tinggal menetap dalam jangka waktu agak lama seringkali tidak benar-benar tahu dan berminat mempelajari kebudayaan Yogyakarta sebagai tempat mereka tinggal dan hidup dalam beberapa waktu ke depan. Tuntutan untuk menyelesaikan studi secepat mungkin, beratnya mencari penghidupan sehari-hari dengan bekerja semenjak pagi hingga

sore hari, sampai dengan keengganan untuk belajar karena keterpisahan tempat tinggal dan minimnya interaksi dengan warga lokal, menjadikan banyak pendatang yang tinggal menetap di Yogyakarta seringkali luput dalam mengetahui dan mempelajari kebudayaan setempat. Kadangkala hal inilah yang kemudian dapat memicu atau memperuncing konflik dan kesenjangan antara warga lokal dengan kelompok pendatang.

Hal inilah yang sebisa mungkin dicegah sejak dini agar konflik dan kesenjangan dapat teratasi. Metodenya salah satunya adalah dengan membentuk program yang mengajak kelompok pendatang, utamanya mahasiswa, untuk dapat mengenal dan mempelajari situs-situs cagar budaya maupun warisan budaya yang ada di sekitarnya, paling tidak di tingkat kecamatan tempat mereka bermukim. Dengan melibatkan IKPMD yang umumnya memiliki asrama daerahnya masing-masing, program ini dapat dijalankan dan digerakkan dengan memobilisasi mahasiswa maupun pelajar luar daerah yang datang untuk tinggal dan menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta.

Tujuan utama dan mendasar dari program ini adalah memperkenalkan sejarah dan nilai-nilai kearifan lokal dari peradaban Yogyakarta yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya kepada para pendatang yang tinggal menetap. Tidak bisa dimungkiri bahwa selama ini masih banyak yang belum mengerti dan memahami seperti apa nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang telah mengakar sejak lama. Keberadaan cagar budaya seringkali dipahami sebatas sebagai tempat wisata saja, sehingga minim edukasi serta penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang dapat ditangkap oleh mereka. Diharapkan dengan kegiatan jelajah yang lebih mendalam, intens, dan dipandu langsung dari pengampu kebijakan, maka penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta kepada para pendatang yang menetap di Yogyakarta ini dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga ketika mereka menetap dalam jangka waktu tertentu di Yogyakarta, mereka dapat menanamkan nilai-nilai lokal tersebut dalam laku keseharian mereka. Juga ketika nantinya mereka kembali ke daerah asal, mereka dapat menceritakan tentang hal ihwal Yogyakarta dengan lebih baik kepada komunitas asalnya.

2) Gelar Budaya Nusantara

Secara mendasar, problem keterpisahan maupun kesenjangan budaya yang terjadi antara warga lokal dengan kelompok pendatang tidak hanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat yang berasal dari luar daerah tentang nilai dan budaya yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta. Pada sisi sebaliknya, masyarakat Yogyakarta sendiri banyak yang belum mengetahui atau setidaknya menaruh perhatian terhadap budaya-budaya lain yang ada dan terbawa oleh para pendatang yang menetap di Kota Yogyakarta. Ketidaktahuan ini tentu saja berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan apabila masing-masing tidak mengetahui bagaimana suatu kebiasaan, adat istiadat, maupun budaya dari kelompok lain dijalankan atau dipraktikkan dalam kehidupan keseharian.

Dalam kenyataannya, para pendatang di Kota Yogyakarta tinggal dan hidup beriringan dengan warga lokal dalam kurun waktu yang relatif lama. Sebagai contoh, ikatan pelajara dan mahasiswa daerah biasanya memiliki asramanya masing-masing, baik itu ikatan mahasiswa tingkat provinsi maupun kabupaten. Keberadaan asrama ini umumnya difasilitasi oleh pemerintah daerah asal yang membangun sebuah asrama sebagai pondokan bagi para pelajar yang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta. Asrama-asrama ini terletak di berbagai titik di Kota Yogyakarta yang memang dikenal sebagai kota pelajar yang memiliki banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi.

Keberadaan asrama-asrama yang tersebar di berbagai titik kampung-kota di Yogyakarta ini sejatinya krusial karena selain menjadi tempat tinggal, ia juga dapat disebut sebagai duta budaya sekaligus representasi berbagai kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Asrama-asrama daerah ini mengemban tugas untuk menjadi perwajahan kultural dari daerah asal mereka, berikut kebudayaan dan adat istiadat yang mereka miliki. Pada saat yang bersamaan, warga lokal dapat belajar mengenai kebudayaan daerah-daerah lain di luar diri mereka melalui keberadaan asrama-asrama daerah ini.

Usulan program Gelar Budaya Nusantara ini dapat menjadi salah satu program alternatif dalam upaya menjalin keterhubungan antara warga lokal dengan kelompok pendatang yang ada di Kota Yogyakarta. Ringkasnya, program

ini akan menampilkan gelaran budaya dari tiap-tiap daerah yang ada di Kota Yogyakarta, yang mana dalam pementasan, pagelaran, maupun penampilannya akan berkolaborasi dengan warga lokal di sekitar asrama daerah yang menjadi tuan rumah bagi pementasan tersebut. Gelaran budaya ini bisa berwujud apa saja, mulai dari pementasan tari, teater, lokakarya, sampai pameran seni rupa. Intinya, setiap elemen baik itu warga lokal maupun kelompok pendatang dapat betul-betul terlibat aktif dan menjalin komunikasi serta pengenalan satu sama lain. Kerjasama ini nantinya akan secara organik membangun kesalingpahaman dan pengetahuan antar entitas budaya yang terlibat, bukan hanya terbatas pada sama-sama bekerja dalam suatu acara (*event*) semata.

Tujuan utama dalam program Gelar Budaya Nusantara ini adalah keterlibatan warga lokal dalam kegiatan dan pagelaran budaya yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara, yang mana diharapkan melalui keterlibatan aktif dan partisipatif tersebut akan menumbuhkan pengetahuan sekaligus ikatan antar budaya. Selama ini program-program yang ada cenderung berfokus pada usaha untuk membuat para pendatang mengenal secara lebih jauh kebudayaan Yogyakarta. Namun, adakalanya juga warga lokal turut belajar untuk memahami kebudayaan-kebudayaan di luar Yogyakarta yang amat beragam. Komunikasi, pengetahuan, dan keterlibatan yang terjalin harapannya akan membuat warga lokal Yogyakarta menjadi lebih paham dan mengenal berbagai macam kebiasaan, adat istiadat, norma, maupun nilai yang ada di luar diri mereka sendiri. Sehingga dengan demikian nantinya interaksi antar budaya dapat terjalin dengan baik, juga dengan segala macam kompromi, negosiasi, maupun kolaborasi untuk memperoleh titik temu ketika suatu saat mungkin saja terjadi konflik maupun pertentangan di antara dua kelompok yang berbeda latar belakang kulturalnya tersebut.

3) Inventarisasi dan Basis Data IKPMD

Kehadiran para perantau di Kota Yogyakarta, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun kelas pekerja riwayatnya sudah berlangsung sejak lama, seusia dengan eksistensi Republik Indonesia itu sendiri. Yogyakarta menjadi pilihan banyak

pelajar dan mahasiswa untuk meneruskan pendidikan di kota pelajar ini, yang dikenal memiliki banyak lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas tinggi. Selain itu, banyak pula para perantau yang berusaha mengadu nasib untuk mencari penghidupan di kota yang kini juga lekat sebagai salah satu tujuan dan destinasi wisata utama di Indonesia. Tiap tahunnya, ribuan orang dari berbagai daerah masuk ke Yogyakarta dan menetap untuk beberapa waktu lamanya di kota ini.

Di Yogyakarta, umumnya mereka menggabungkan diri ke dalam ikatan-ikatan berbasis kedaerahan sebagai sebetuk solidaritas sesama perantau dari daerahnya masing-masing. Ikatan-ikatan daerah ini biasanya berbasiskan tingkat administratif seperti kabupaten, kota, maupun provinsi. Selain itu ada pula ikatan daerah yang berbasiskan etnisitas, klan, atau marga. Selain ikatan-ikatan kultural kedaerahan seperti ini, dibangun pula asrama-asrama daerah yang ditujukan memfasilitasi para pelajar dan mahasiswa dari daerah asal yang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta. Asrama-asrama ini dibangun dan disediakan oleh pemerintah daerah setempat yang memiliki perhatian bagi warganya yang sedang merantau di luar daerah.

Hampir seluruh kabupaten/kota dan provinsi, utamanya yang berasal dari luar Pulau Jawa, memiliki asrama-asrama daerah yang tersebar di sudut-sudut Kota Yogyakarta. Sangat mudah ditemui berbagai asrama mahasiswa daerah dari berbagai wilayah, lengkap dari Aceh hingga Papua ada dan berdiri di Yogyakarta. Selain sebagai tempat tinggal, asrama juga diisi dengan banyak kegiatan bagi para penghuninya, mulai dari kegiatan yang bersifat pengembangan diri, minat dan bakat, keilmuan, hingga kerjasama dengan berbagai pihak di luar mereka. Asrama-asrama daerah lantas menjadi ruang titik temu sekaligus semacam “duta budaya” bagi daerah-daerah tersebut di hadapan masyarakat Kota Yogyakarta.

Maka kemudian menjadi penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendata keberadaan ikatan kedaerahan yang ada, termasuk dalam hal ini asrama-asrama mereka yang tersebar di seantero Kota Yogyakarta. Pendataan ini menjadi penting sebagai basis data dan informasi guna menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Patut digarisbawahi bahwa mereka adalah para pelajar

dan mahasiswa yang diharapkan ke depannya dapat berkontribusi dalam peran dan bidangnya masing-masing kelak ketika mereka sudah lulus. Maka dengan basis data dan informasi yang mencukupi, nantinya apabila akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterlibatan dari organisasi mahasiswa daerah maupun para perantau lainnya, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki data siapa, di mana, dan apa yang mereka lakukan ke depannya.

Pendataan ini dapat pula disebut sebagai usaha menghimpun keberadaan para perantau daerah yang ada di Kota Yogyakarta ke dalam satu forum komunikasi. Nantinya dengan forum komunikasi yang terbentuk, maka akan memudahkan apabila kegiatan-kegiatan kebudayaan maupun pembangunan sumber daya manusia ingin dilakukan di Kota Yogyakarta. Ketika komunikasi dan kerjasama terjalin, maka diharapkan akan terbangun sebuah relasi yang baik dan harmonis, sehingga dapat membangun interaksi antar budaya yang semakin baik pula di Kota Yogyakarta.

4) Lokakarya Penulisan Sejarah Perantau Daerah di Yogyakarta

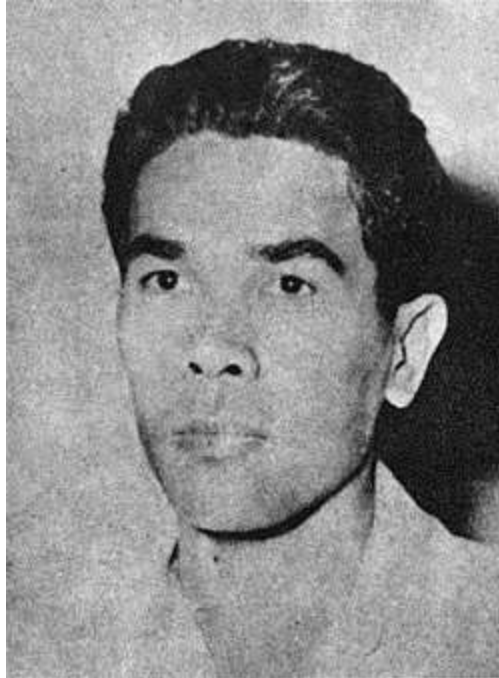
Kehadiran mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang tinggal menetap dan belajar di Yogyakarta sudah terjadi sejak lama, setidaknya sedari awal Indonesia merdeka. Mereka rela datang dari tempat-tempat yang jauh untuk menempuh pendidikan di kota yang dikenal sebagai kota pelajar ini. Dengan berbagai motivasi dan cara, entah oleh dorongan diri sendiri maupun beasiswa dari pemerintah daerah asal mereka, orang-orang muda dari berbagai tempat di Indonesia ini mengalir setiap tahunnya memenuhi Kota Yogyakarta untuk merajut mimpinya di sini, menempa diri menjadi orang yang berilmu-pengetahuan demi masa depan.

Di Yogyakarta, banyak dari mereka kemudian membentuk suatu organisasi ikatan kedaerahan, yang didasarkan pada kesamaan asal tempat mereka tinggal sebelumnya. Perhatian pemerintah daerah mereka juga hadir melalui asrama-asrama mahasiswa dan pelajar yang tersebar di segala penjuru Kota Yogyakarta. Baik itu ikatan kedaerahan maupun asrama daerah ini umumnya terbagi ke dalam dua basis administratif: ikatan mahasiswa dan asrama tingkat provinsi serta ikatan

mahasiswa dan asrama tingkat kabupaten/kota. Meski dalam kenyataannya, tidak semua perantau yang datang untuk belajar ke Yogyakarta tergabung dalam ikatan daerah maupun tinggal di asrama milik pemerintah daerah mereka. Banyak pula yang tinggal dan menempuh pendidikan secara independen, artinya tidak terikat dalam suatu organisasi tertentu.

Hanya saja, oleh karena keberadaan mereka telah turun-temurun selama puluhan tahun, seringkali generasi-generasi yang datang kemudian banyak yang belum atau bahkan tidak mengetahui bagaimana riwayat kehadiran para perantau dari daerah mereka di Yogyakarta. Lebih spesifik lagi, sejak kapan mereka datang ke Yogyakarta, siapa saja yang dapat berangkat dan mampu untuk menempuh pendidikan di kota ini, sejauh mana mereka dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat, masyarakat asal daerahnya, atau bahkan secara umum di tingkat nasional, dan berbagai pertanyaan mendasar lainnya yang relevan. Hal-hal seperti ini seringkali terputus sejarahnya, sehingga seringkali generasi yang lebih muda seperti kehilangan arah, kurang memiliki inspirasi, serta minim pewarisan nilai-nilai dari para sesepuh atau senior yang telah lebih dulu tinggal dan menetap di kota pelajar ini. Padahal hal-hal seperti ini penting untuk dipelajari dan diwariskan sebagai sebuah nilai pembelajaran bagi generasi muda yang turut merantau dari daerah asal ke Yogyakarta. Selain itu, pencarian terhadap kisah-kisah ini juga masih amat memungkinkan untuk dilakukan dan dikerjakan.

Maka kemudian, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dapat memfasilitasi penulisan sejarah mahasiswa perantau dari daerah asal mereka ke Yogyakarta. Menggunakan metode riset sejarah, pemerintah dapat memberikan fasilitasi pelatihan atau lokakarya bagaimana menyusun sejarah secara sederhana namun tetap menggunakan kaidah keilmuan guna menghasilkan sebuah narasi yang baik dan dapat dipergunakan sebagai sarana edukasi. Nantinya, pelatihan ini dapat dilakukan dengan menggandeng organisasi mahasiswa daerah yang biasanya sudah satu kesatuan dengan asrama daerah yang ada di Kota Yogyakarta.



Gambar 5. 1 Gambar Herman Johannes, seorang perantau asal Timor yang kemudian menjadi guru besar sekaligus Rektor Kedua Universitas Gadjah Mada. Ia hanya satu dari sekian banyak para pelajar dan mahasiswa perantau yang sukses menorehkan pencapaian terbaik untuk kemajuan bangsa. (Sumber: Wikipedia)

Tujuan dari program ini adalah membangun sebuah narasi bagi para perantau daerah ini bahwa kehadiran mereka di Kota Yogyakarta adalah untuk membangun daerah asal mereka, memberikan kontribusi bagi Yogyakarta, juga bahkan sebagai seorang pemimpin bangsa. Keterputusan pengetahuan dan memori kolektif mereka dapat dibangun kembali dengan melihat ke masa lalu bahwa banyak dari para perantau pendahulu mereka yang banyak memberikan sumbangsih bagi pembangunan manusia dan kebudayaan di berbagai bidang dan tingkatan yang mereka lakukan. Selain itu bagi Kota Yogyakarta sendiri, penulisan sejarah para perantau ini memberikan kontribusi narasi sejarah yang semakin menguatkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi lingkup nasional dan menyebar ke setiap sudut daerah di Indonesia. Dari sini dapat dilihat bahwa Kota Yogyakarta nantinya dapat pula dicanangkan sebagai ibukota pendidikan Indonesia dengan kontribusinya yang sudah tidak terhitung lagi sejak awal Indonesia merdeka.

Warga lokal Yogyakarta sendiri nantinya dapat menyaksikan bahwa sejarah kehidupan kota yang mereka tinggali sudah sejak awal lekat dengan kehadiran para perantau yang menempuh pendidikan di kota ini. Artinya, kehidupan yang relatif majemuk dan plural sejatinya memiliki riwayat panjang yang turut membentuk wajah Kota Yogyakarta hingga kini.

5) Museum Pendidikan Tinggi

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah menjadi tempat titik temu (*melting pot*) bagi banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di wilayah Hindia Belanda yang ingin menempuh pendidikan tingkat lanjut di kota ini. Layaknya kota-kota besar di Pulau Jawa saat itu seperti Batavia (Jakarta), Bandung, Semarang, Surakarta, maupun Surabaya, di Yogyakarta berdiri beberapa sekolah tinggi, khususnya untuk mereka calon-calon pegawai pemerintah kolonial Belanda. Para putra-putri dari berbagai daerah datang ke kota ini guna mengembangkan ilmu dan pengetahuan mereka untuk menapaki tangga hierarki pemerintah kolonial.

Peningkatan secara masif pertumbuhan jumlah sekolah dan perguruan tinggi di Yogyakarta terjadi ketika Indonesia merdeka. Dalam periode ketika Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia di masa Revolusi, sebuah universitas nasional pertama milik negara didirikan yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1949. Segera saja mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong datang ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan di kampus negeri tertua di Indonesia tersebut. Lahirnya UGM pada 1949 lantas memicu kemunculan kampus-kampus lain yang dimiliki oleh swasta. Sepanjang periode Sukarno, selain UGM juga lahir IAIN Sunan Kalijaga dan IKIP Yogyakarta yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian, arus kedatangan mahasiswa luar Yogyakarta yang kemudian tinggal menetap untuk beberapa waktu di kota ini juga turut membesar jumlahnya. Inilah salah satu faktor yang kemudian membentuk wajah kota Yogyakarta yang multietnis dan multikultur dengan keberadaan pendatang dan segenap budaya asal mereka di sudut kota, tanpa meniadakan atau meredupkan kebudayaan Jawa itu sendiri sebagai tuan rumah.

Dari sekian ribu atau bahkan mungkin jutaan orang dari berbagai daerah yang pernah menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di Yogyakarta, tentu banyak dari mereka yang akhirnya berhasil menjadi tokoh. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tokoh adalah mereka yang lantas tumbuh, berkembang, dan berakhir menjadi seorang yang dinilai memiliki jasa, peran, keahlian, kepandaian, penentu kebijakan, dsb., dalam bidangnya masing-masing, yang sedikit banyak ditempa selama berkuliah di Yogyakarta. Banyak dari mereka berasal dari luar daerah, dan kemudian mengembangkan dan mengambil perannya di daerah asal mereka masing-masing maupun di tingkat nasional.

Maka kiranya perlu dibangun suatu museum untuk mengabadikan sekaligus menjadi monumen bagi Kota Yogyakarta sebagai kota tempat dilahirkannya para pemimpin bangsa, tokoh ilmuwan, dan segenap orang-orang yang dianggap terdepan di bidangnya, yang mana kesemuanya itu berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Selain sebagai memorial sekaligus sarana edukasi, museum ini menjadi penting untuk dapat membangun ikatan kultural maupun emosional antara mereka yang merupakan pendatang dengan warga lokal Yogyakarta selaku tuan rumah yang memberikan tempatnya sebagai sarana pendidikan bagi siapapun dari seluruh Indonesia.

Keberadaan museum ini kemudian menjadi penanda dan penciptaan memori bersama antara warga lokal Yogyakarta dengan masyarakat pendatang yang utamanya datang ke sini sebagai pelajar. Oleh sebab, dari monumen ini mereka dapat mengetahui bahwa banyak sekali dari mereka yang dulunya sama-sama sebagai pemuda dan menempuh pendidikan di Yogyakarta, dapat menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi penting bagi masyarakat banyak, bagi negara, entah itu di tingkat daerah maupun nasional. Yogyakarta kemudian menjadi tempat bagi mereka memulainya dengan belajar, tumbuh, dan berkembang di kota pendidikan ini. Harapannya, selain sebagai pengikat secara kultural dan emosional, museum ini nantinya dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja bahwa banyak dari mereka yang menjadi “sukses dan berhasil” dalam berbagai bidang yang mereka geluti setelah menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta. Sekaligus keberadaan museum ini dapat menjadi penanda bahwa Yogyakarta adalah

ibukota pendidikan Indonesia, karena selain banyaknya kampus dan sekolah, keberadaan pelajar dari berbagai daerah di Nusantara, juga menunjukkan hasil bahwa dari kota inilah lahir para pemimpin juga pembangun yang berkontribusi bagi kemajuan negara.



Gambar 5. 2 Gambar Beberapa museum milik kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Museum kampus ini kemudian dapat menjadi prototipe bagi Museum Pendidikan Tinggi yang nantinya akan dapat lebih komprehensif dan lengkap. (Sumbe: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

5.3. Rancangan Model Kebijakan atau Intervensi Sosial-Budaya

Tawaran program alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar budaya ini rencananya akan dilakukan secara periodik, mulai dari bulanan, dwibulanan, dan tahunan. Dari kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan ini,

nantinya diharapkan bahwa keterhubungan antar warga masyarakat lokal dengan pendatang yang beragam secara kultural ini dapat terjalin dengan baik. Relasi yang terbangun dengan baik ini pada akhirnya bermuara pada kehidupan sosial warga di Kota Yogyakarta yang jauh lebih harmonis, kondusif, dan saling gotong royong satu sama lain. Kegiatan ini juga nantinya dapat menjadi saran promosi kebudayaan, yang semakin menguatkan Kota Yogyakarta sebagai rumah bagi banyak perantau yang ingin belajar dan menimba ilmu di kota ini. Berikut ini adalah rancangan program dan intervensi sosial dan budaya yang dapat dijadikan alternatif guna pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta:

1) Jelajah Budaya Mataram Islam

- Judul Kegiatan: Heritage Trail Mataram Islam
- Sasaran Kegiatan: Pelajar dan Mahasiswa Luar DIY serta Ikatan Kedaerahan
- Waktu Pelaksanaan: Dua Bulanan
- Tujuan Kegiatan: Mengenalkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dari luar Yogyakarta mengenai eksistensi, peran, dan sejarah Kerajaan Mataram Islam yang berdiri di Kotagede, Yogyakarta sebagai salah satu kerajaan tua yang penerusnya masih berdiri hingga kini.
- Teknis Kegiatan: Pemerintah kota melalui dinas kebudayaan membuat rilis pengumuman dan menyelenggarakan kegiatan tur atau jelajah wilayah Kerajaan Mataram Islam yang ada di Kota Yogyakarta. Peserta diutamakan mereka yang berasal dari luar daerah, terutama sekali para mahasiswa dan pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta. Lantas pada hari penyelenggaraan, mereka diajak tur dipimpin oleh pemandu menelusuri beberapa kawasan yang dahulu merupakan bekas keraton dan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, yang mana saat ini berada di daerah Kotagede. Melalui tur ini, tiap peserta diedukasi mengenai bagaimana sebuah pusat kebudayaan Jawa berdiri di masa lalu sebagai ahli waris dari kerajaan-kerajaan Jawa

kuno di masa klasik. Dari sini nantinya mereka dapat mengetahui sejarah panjang kota yang saat ini mereka huni untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Di akhir tur, peserta diminta membuat refleksi, baik melalui tulisan maupun audio visual mengenai kesan, makna, dan pelajaran yang mereka peroleh setelah mengikuti tur tersebut.



Gambar 5. 3 Gambar Pintu masuk Makam Raja-raja Mataram di Kotagede, Yogyakarta. Kawasan ini merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada sekitar abad ke-16 sebelum akhirnya pecah menjadi dua kerajaan. (Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta)

2) Tur Sumbu Filosofis

- Judul Kegiatan: Jelajah Sumbu Filosofis di Kota Yogyakarta
- Sasaran Kegiatan: Mahasiswa Luar Yogyakarta
- Waktu Pelaksanaan: Bulanan
- Tujuan Kegiatan: Mengenalkan dan memberikan edukasi tentang nilai-nilai kebudayaan Yogyakarta kepada masyarakat pendatang dari luar Yogyakarta mengenai sumbu filosofis yang membentang sejak dari sisi utara hingga selatan Kota Yogyakarta.
- Teknis Kegiatan: Pemerintah kota melalui dinas kebudayaan membuat rilis pengumuman dan menyelenggarakan kegiatan tur atau jelajah sumbu

filosofis yang ada di Kota Yogyakarta. Peserta diutamakan mereka yang berasal dari luar daerah, terutama sekali para mahasiswa dan pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta. Lantas pada hari penyelenggaraan, mereka diajak tur dipimpin oleh pemandu menelusuri titik-titik penting dalam sumbu filosofis Yogyakarta. Melalui tur ini, tiap peserta diedukasi mengenai nilai-nilai fundamental dan luhur kebudayaan Jawa, sebuah tempat yang mana saat ini mereka menetap dan tinggal untuk beberapa waktu ke depan. Di akhir tur, peserta diminta membuat refleksi, baik melalui tulisan maupun audio visual mengenai kesan, makna, dan pelajaran yang mereka peroleh setelah mengikuti tur tersebut.



Gambar 5. 4 Gambar Tugu Yogyakarta yang menjadi salah satu dari bagian Sumbu Filosofi Yogyakarta, selain Gunung Merapi, Keraton, dan Panggung Krapyak. (Sumber: kratonjogja.id)

3) Gelar Budaya Nusantara

- Judul Kegiatan: Festival Budaya Nusantara
- Sasaran Kegiatan: Masyarakat Kota Yogyakarta di tingkat kemantren dan ikatan mahasiswa daerah yang bersekretariat di wilayah kemantren
- Waktu Pelaksanaan: Tahunan
- Tujuan Kegiatan: Mengenalkan dan melibatkan masyarakat Yogyakarta pada peristiwa budaya yang berasal dari luar daerah sebagai sarana untuk

mengedukasi sekaligus memperluas wawasan agar dapat mengenal berbagai macam kebudayaan dan kesenian dari luar Yogyakarta.

- Teknis Kegiatan: Sebagai sebuah program rintisan atau permulaan, Gelar Budaya Nusantara ini nantinya akan diselenggarakan di tingkat kemantren. Teknisnya adalah dengan melibatkan warga lokal di sekitar asrama-asrama daerah yang ada di lingkup kemantren untuk turut dalam sebuah kegiatan pementasan, pertunjukan, maupun pameran kebudayaan dan kesenian yang mengambil tema utama budaya daerah asrama tersebut. Jadi, dalam suatu eksibisi yang berbasiskan budaya daerah tertentu, warga lokal akan menjadi subjek utama yang tampil dan terlibat dalam program tersebut. Keberadaan mahasiswa perantau di asrama tersebut berperan sebagai fasilitator sekaligus pengarah. Pada akhirnya jika dapat diselenggarakan, warga lokal Yogyakarta akan mempelajari sebuah kebudayaan baru yang mungkin saja selama ini jauh dari jangkauan maupun pandangan mereka sendiri, kendati mungkin saja mereka para pemilik kebudayaan tersebut sehari-hari tinggal di dekat mereka. Dari sini nantinya akan terbangun pemahaman dan perasaan saling pengertian, mengubur kecurigaan, stigma, dan prasangka, karena tidak hanya para perantau yang mempelajari budaya lokal, tetapi masyarakat lokal itu sendiri turut serta memahami dan mengerti bagaimana sebuah kebudayaan lain ada di antara mereka.



Gambar 5. 5 Gambar Penyelenggaraan Festival Sastra Yogyakarta yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini dapat menjadi salah satu percontohan bagi penyelenggaraan Gelar Budaya Nusantara yang nantinya akan lebih beragam dalam hal asal daerah untuk konten-konten acara yang dihadirkan, yang dapat melibatkan partisipasi aktif para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. (Sumber: jogjakota.go.id)

4) Inventarisasi Ikatan Mahasiswa Daerah

- Judul Kegiatan: Inventarisasi dan Pendataan Organisasi Ikatan Mahasiswa Daerah
- Sasaran Kegiatan: Ikatan mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta
- Waktu Pelaksanaan: Tahunan
- Tujuan Kegiatan: Membuat suatu basis data mengenai keberadaan ikatan mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta guna memudahkan dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun mobilisasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan dan pemajuan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Teknis Kegiatan: Pemerintah kota mengirimkan surat dan memberikan pengumuman mengenai pendataan organisasi ikatan mahasiswa daerah yang ada dan bersekretariat di Kota Yogyakarta. Lantas kemudian dibuat suatu form pendataan yang merinci mengenai data-data fundamental

seperti pengurus, alamat sekretariat, dan program kerja yang mereka tiap-tiap organisasi ikatan mahasiswa daerah miliki. Kemudian dibuat suatu basis data khusus yang berisi informasi mengenai tiap-tiap organisasi tersebut. Juga dibentuk suatu forum komunikasi maupun grup khusus yang berisi para ketua atau pimpinan dari organisasi mahasiswa daerah yang ada, yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.

5) Lokakarya Penulisan Sejarah Perantau

- Judul Kegiatan: Lokakarya Penulisan Sejarah Pelajar Perantau Daerah di Yogyakarta
- Sasaran Kegiatan: Ikatan mahasiswa daerah di Yogyakarta
- Waktu Pelaksanaan: Empat bulan
- Tujuan Kegiatan: Menghasilkan suatu narasi sejarah yang menjelaskan awal mula, perjalanan, dan pencapaian dari para pelajar perantau tiap daerah yang mengenyam pendidikan tinggi di Kota Yogyakarta. Harapannya dari narasi yang diproduksi nantinya akan dapat menjadi inspirasi bagi generasi perantau yang lebih muda untuk dapat bercermin dari keberhasilan para senior pendahulu mereka yang menempuh pendidikan di kota ini.
- Teknis Kegiatan: Pemerintah kota melalui dinas kebudayaan menyelenggarakan suatu pelatihan penulisan sejarah bagi para anggota ikatan mahasiswa daerah yang mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk menelusuri sejarah para pelajar perantau dari daerah mereka ke Yogyakarta. Peserta yang terlibat nantinya diberikan dasar-dasar metode penelitian sejarah guna menggali informasi sebanyak dan sedalam mungkin mengenai hal tersebut. Juga dilakukan pelatihan kecil (*workshop*) bagi mereka untuk melakukan kerja praktik penelitian sejarah sederhana. Setelahnya mereka nantinya akan diminta turun ke lapangan menghimpun sumber dokumen maupun cerita yang dapat membangun

narasi sejarah mengenai para perantau dari daerah mereka dari sejak mula Indonesia merdeka hingga kini. Nantinya lokakarya ini akan menghasilkan suatu antologi buku yang berisi cerita sejarah tentang para perantau tersebut dari masing-masing daerah. Harapannya dari penelitian awal ini akan dapat meningkat lebih mendalam dan detail lagi, yang mana nantinya narasi yang telah mereka hasilkan dapat digunakan sebagai bahan untuk *storyline* dalam Museum Pendidikan Tinggi.

6) Museum Pendidikan Tinggi

- Judul Kegiatan: Pembangunan Museum Pendidikan Tinggi
- Sasaran Kegiatan: Pemerintah Kota Yogyakarta
- Waktu Pelaksanaan: Satu kali
- Tujuan Kegiatan: Membangun sebuah museum yang di dalamnya menceritakan dan memberikan edukasi mengenai peran Kota Yogyakarta sebagai sebuah kota pelajar, di mana banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai tempat di Indonesia menempuh pendidikan tinggi di kota ini. Dalam hal ini Yogyakarta menjadi semacam kawah candradimuka bagi para pelajar yang ingin mentransformasikan dirinya menjadi individu yang berilmu dan berpengetahuan, guna membangun dirinya sendiri maupun berperan bagi masyarakat dan bangsa secara luas. Nantinya dari sini museum ini dapat menjadi rumah inspirasi bagi siapa saja yang mengunjunginya bahwa Yogyakarta adalah tempat yang sangat baik guna membangun peradaban dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
- Teknis Kegiatan: Museum ini nantinya akan diisi dengan rangkaian cerita (*storyline*) yang menjelaskan kedudukan Kota Yogyakarta sebagai rumah bagi banyak perguruan tinggi yang berdiri sejak awal Indonesia merdeka. Di dalamnya nanti akan banyak berisi informasi bagaimana pendidikan tinggi berkembang di kota ini, peran perguruan tinggi dalam setiap isu, kebijakan, dan persoalan nasional untuk dapat turut membantu menyelesaikan problem di masyarakat maupun bangsa secara umum, siapa saja orang-orang dari berbagai daerah yang menempuh pendidikan

di sini dan kemudian berhasil menjadi tokoh yang berpengaruh dan berperan penting di bidangnya masing-masing khususnya untuk lingkup nasional, serta berbagai macam informasi yang relevan terkait dengan peran Yogyakarta sebagai pembentuk kaum intelektual Indonesia.

5.4. Indikator Keberhasilan dan Rencana Tindak Lanjut

1) Ragam Partisipan

Salah satu indikator keberhasilan dari program-program yang ditawarkan di atas adalah seberapa beragam para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini. Dalam artian, partisipan yang diposisikan sebagai subjek dalam berbagai program tadi terdiri atas berbagai kelompok masyarakat yang beragam secara etnisitas maupun kultural. Seperti yang telah diuraikan di atas, Kota Yogyakarta dihuni tidak hanya oleh masyarakat lokal yang berlatarbelakang Jawa saja, melainkan banyak sekali kelompok masyarakat pendatang dari berbagai kota di Indonesia yang tinggal dan menetap di kota ini. Sebagai usaha untuk meretas batas-batas kultural ini, berbagai program yang ditawarkan di atas diharapkan dapat menghimpun banyak sekali peserta dari berbagai macam latar belakang, sehingga dengan demikian akan terbentuk suatu komunikasi antar budaya yang nantinya diharapkan dapat terjadi secara organik.

Pada dasarnya, berbagai program yang telah ada selama ini memang terbuka bagi siapapun untuk turut serta di dalamnya. Namun, ada program yang tampaknya memang perlu secara khusus “menjemput bola” dengan mengundang setiap perwakilan dari berbagai ikatan pelajar dan mahasiswa daerah maupun komunitas etnis yang ada dan tersebar di banyak titik di Kota Yogyakarta. Harapannya ini nantinya dapat menjadi pemantik bagi setiap anggota yang tergabung dalam ikatan daerah tersebut untuk dapat turut aktif dalam berbagai program-program kebudayaan lainnya. Sehingga, jembatan budaya di antara berbagai kelompok masyarakat yang beragam secara kultural ini dapat terbangun dan terbentuk untuk jangka waktu panjang.

2) Sebaran Partisipan

Persebaran partisipan juga menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana sebuah program dan kegiatan direspons oleh berbagai kelompok masyarakat pendatang yang ada di Kota Yogyakarta. Patut digarisbawahi bahwa hampir setiap putra-putri daerah dari tiap provinsi yang ada di Indonesia, ada perwakilannya di Kota Yogyakarta, baik yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja di kota ini. Maka kemudian, dalam tiap kegiatan yang diselenggarakan perlu dicatat asal daerah mereka yang terlibat dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan. Dalam amatan sekilas, selama ini umumnya para peserta masih terbatas pada mereka yang berasal dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya yang masih berada dalam teritori Indonesia bagian barat. Perlu juga kiranya mendorong mereka yang berasal dari Indonesia bagian timur untuk turut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di bawah naungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hal ini menjadi penting untuk memperluas jangkauan acara yang diselenggarakan, mengingat bahwa hampir setiap daerah, khususnya mereka yang berasal dari luar Pulau Jawa, mengirimkan para pelajar dan mahasiswa dalam jumlah yang tidak sedikit ke kota ini. Jika para peserta yang mengikuti setiap program masih timpang dalam hal daerah asal, maka menjadi pertanyaan penting mengapa dari daerah-daerah lain belum turut serta mengikuti program yang diselenggarakan dalam rangka mendorong pemajuan kebudayaan tersebut. Harapannya, dengan sebaran partisipan yang jauh lebih beragam dan merata, diharapkan usaha untuk membangun relasi dan interaksi antar budaya, sekaligus usaha untuk menghapus stereotipe dan prasangka antar etnis, dapat berjalan dengan baik dan menuai hasil yang memuaskan pula.

3) Respons Partisipan

Selain sebaran dan keberagaman peserta, indikator lainnya dapat dilihat dari respons peserta yang mengikuti program dan kegiatan yang dilakukan di bawah naungan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut. Respons ini dapat dilakukan dengan mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh penyelenggara untuk

mengetahui sejauh mana sebuah program dan kegiatan berdampak bagi para peserta yang terlibat. Selain itu respons dapat dilihat pada bagaimana mereka membuat unggahan maupun rilis (dalam bentuk apapun) yang mereka lakukan setelah mengikuti program kegiatan. Tapi tentu saja hal ini bukanlah menjadi indikator utama dan satu-satunya. Salah satu yang dapat dilihat adalah setelah mereka selesai mengikuti program yang diselenggarakan, nantinya sejauh mana mereka akan melanjutkan kegiatan dengan cara mereka sendiri. Terlebih, dapat pula dilihat sejauh mana sebuah kegiatan berdampak dan membuat perubahan, baik itu kecil maupun besar, terhadap komunitas tempat mereka hidup, tinggal, dan bernaung.

Misalnya saja, perlu diukur bagaimana para peserta tersebut dapat menyesuaikan atau melakukan berbagai macam nilai dan norma budaya Yogyakarta yang telah mereka pelajari dan ketahui diterapkan dalam laku hidup mereka sehari-hari. Tentu hal ini bukanlah hal yang sederhana untuk diukur, terutama dalam waktu yang singkat pasca selesainya kegiatan. Namun, dampak jangka panjanglah yang diharapkan dapat dirasakan di masa depan. Selama ini banyak masyarakat pendatang yang mengalami keterputusan dengan nilai-nilai dan norma budaya lokal Yogyakarta. Harapannya, dengan pewarisan nilai dan pengetahuan tentang kebudayaan Yogyakarta, kehidupan bermasyarakat dapat berjalan jauh lebih harmonis, damai, dan kondusif di tengah pluralitas dan kemajemukan penduduk Kota Yogyakarta.

4) Jangkauan di Media Sosial

Pada masa sekarang, dokumentasi dan laporan hasil kegiatan berupa unggahan di media sosial menjadi penting untuk dilakukan. Selain laporan kegiatan yang bentuknya rigid dan dilaporkan untuk kepentingan administrasi-birokrasi, dokumentasi kegiatan yang dibagikan di media sosial menjadi salah satu tolok ukur penting untuk mengetahui seberapa jauh persebaran, respons, ketertarikan, dan rencana tindak lanjut program dilakukan di masa berikutnya. Di era digital seperti sekarang, ketersebaran informasi di ruang-ruang maya menjadi

salah satu indikator bagaimana sebuah program mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari banyak orang melampaui sekat geografis maupun ruang.

Idealnya, setiap kegiatan atau program yang dilakukan kemudian dibuatkan suatu pos unggahan di tiap media seperti Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, maupun Twitter. Unggahan dapat berupa foto, video, maupun teks pendukung yang merangkum seluruh kegiatan sejak permulaan hingga akhir. Nantinya, dari sini dapat diketahui respons pengguna media sosial lain terhadap acara yang telah dilaksanakan, baik itu tanda suka (*like*) yang mereka berikan, berapa kali unggahan tersebut dibagikan (*share*) maupun diunggah ulang (*repost*), terlebih komentar yang mereka sematkan. Meski memang jumlah angka statistik pada setiap unggahan belum tentu mencerminkan kondisi riil ketika acara dilaksanakan, setidaknya setiap unggahan yang ada dapat menjadi penanda, arsip kegiatan, sekaligus penciptaan persona (*branding*). Sehingga pada kegiatan-kegiatan lanjutan, angka partisipasi langsung maupun ketersebaran informasi perihal kegiatan tersebut dapat lebih mudah naik.

Tidak hanya itu, jika berbicara mengenai dampak, maka pesan yang tersemat dari acara-acara yang diselenggarakan tersebut akan menyebar lebih jauh melampaui batas-batas geografis oleh karena internet yang sifatnya mendunia dan mengglobal. Sebagai misal, program-program yang memberikan nilai dan makna mengenai penguatan interaksi antar budaya yang terjadi di Kota Yogyakarta, dapat dengan mudah disebarkan dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di kota lainnya yang bahkan jauh dari Yogyakarta untuk dapat menangkap pesan yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Di era media sosial, hal inilah yang selalu menjadi target utama bahwa meski sebuah acara dilaksanakan secara lokal dapat membawa dampak di tingkat global.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari paparan hasil kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan dan strategi kebudayaan masih menjadi metode yang ampuh guna membangun kehidupan sosial bermasyarakat yang plural, harmonis, dan dapat saling mendukung satu sama lain. Esensi kebudayaan sebagai sebuah perilaku untuk membawa kemaslahatan dan keberadaban umat manusia dapat dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi tiap individu dari berbagai latar belakang kultural untuk dapat membangun diri, komunitas, dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan kondisi Kota Yogyakarta yang sejak dari awal berdirinya dapat disebut sebagai kota yang majemuk, terbuka pada kehadiran kelompok pendatang, dan dapat hidup damai berdampingan satu sama lain.

Kota Yogyakarta telah membuktikan hal tersebut selama ratusan tahun lamanya. Hal tersebut semakin tampak ketika Indonesia merdeka, saat Yogyakarta selalu menjadi tujuan utama bagi para pelajar dari seluruh Nusantara, para pelancong dari berbagai daerah bahkan mancanegara, maupun para pendatang lainnya yang mengadu nasib mencari penghidupan di kota ini. Akulturasi budaya telah menjadi bagian penting dan tak terelakkan dalam sejarah panjang Kota Yogyakarta yang di dalamnya terdiri atas berbagai macam etnis yang turut membentuk wajah kota ini.

Meski demikian dalam perjalanannya, berbagai interaksi antar budaya di Kota Yogyakarta ini juga tidak selalu mulus. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi relasi antar kelompok masyarakat di kota ini semisal latar belakang sejarah, perbedaan nilai dan norma, kompetisi dalam memperoleh sumber daya dan mata pencaharian, perbedaan bahasa dan komunikasi, globalisasi, sampai perubahan sosial yang terjadi. Walau terdapat banyak tantangan, yang bahkan kadang meletup menjadi konflik terbuka bahkan menjurus pada kekerasan, masyarakat Kota Yogyakarta dapat melalui dan menyelesaikan itu semua. Secara

umum Kota Yogyakarta dapat disebut sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia.

Maka kemudian, untuk mengatasi, menanggulangi, dan mencegah munculnya bibit-bibit konflik di tengah masyarakat yang plural, berbagai macam program, kegiatan, maupun kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan mesti dilaksanakan. Melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, pemerintah kota memfasilitasi berbagai macam pelaksanaan kegiatan kebudayaan guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghargai satu sama lain, di samping pula mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Yogyakarta yang pada dasarnya memang sudah cukup bagus.

6.2. Implikasi Kebijakan

Dari berbagai saran dan rekomendasi alternatif program yang diuraikan di atas, salah satu implikasi penting yang patut digarisbawahi adalah mengenai metode pendampingan yang mesti dilakukan terus menerus. Pada dasarnya, program-program yang ditawarkan di atas sifatnya selalu berkelanjutan dan berusaha melibatkan secara aktif para target sasaran, baik itu masyarakat lokal maupun kelompok pendatang. Artinya, program yang dilakukan membutuhkan pendampingan yang intensif dari pemerintah selaku pengampu kebijakan agar program-program yang dilaksanakan tersebut dapat tepat sasaran.

Kritik yang selama ini kerap dilontarkan adalah bahwa berbagai macam kegiatan tersebut kurang melibatkan secara aktif para subjek kebudayaan yang ada. Kebanyakan mereka hanya sekadar menjadi panitia, dan selebihnya menjadi penonton semata. Program ke depannya perlu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat lokal maupun pendatang, sehingga pemerintah cukup menjadi fasilitator bagi program-program yang ada. Dengan demikian, diharapkan nantinya segala tujuan program ini yang berusaha merekatkan dan mengharmoniskan segenap masyarakat Kota Yogyakarta yang plural dan majemuk ini dapat terlaksana dengan baik ketika mereka yang menjadi sasaran kegiatan diposisikan sebagai subjek utama kegiatan dan program.

6.3. Keterbatasan Kajian dan Saran untuk Penelitian Lanjutan

Salah satu keterbatasan dalam kajian ini adalah menyusun indikator keberhasilan dalam bidang pembangunan dan pemajuan kebudayaan. Tidak dapat dimungkiri bahwa seringkali indikator keberhasilan ini sebatas dinilai dari terlaksananya penyelenggaraan acara, dengan laporan administrasi yang telah selesai dan memenuhi syarat. Secara birokrasi, hal tersebut tentu saja sudah tepat. Hanya saja, jika ditilik lebih mendalam, seringkali indikator keberhasilan pada target sasaran program inilah yang masih luput untuk dapat diukur secara mendalam. Hal tersebut disebabkan oleh karena bidang kebudayaan bukanlah sesuatu yang dapat diukur secara kualitatif berdasarkan angka-angka statistik di atas kertas saja. Perilaku manusia umumnya tidak selalu dapat dijelaskan secara matematis, melainkan mesti diamati secara utuh dan menyeluruh karena manusia selalu dinamis dan berubah. Belum lagi jika menilik bahwa strategi kebudayaan yang dimaksud di sini menyasar pada komunitas, yang seringkali terbagi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang.

Maka idealnya dalam penelitian lanjutan nanti, ukuran keberhasilan sebuah program dan kebijakan kebudayaan ini dapat dibuatkan standar pengukuran yang lebih mendalam, yang tidak terbatas pada persoalan administratif maupun kuantitatif belaka, melainkan lebih jauh berupa bagaimana suatu program memberikan pengaruh dan dampak ke depannya, baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, perlu membuat sebuah program yang sifatnya berkelanjutan dan memerlukan sebuah pendampingan terus menerus. Program-program yang sifatnya insidental atau sekali jalan sudah sebaiknya diganti dengan program yang lebih berkelanjutan, membangun relasi dan keterlibatan aktif subjek yang terus menerus guna mencapai pemajuan kebudayaan yang benar-benar menyentuh dan berdampak hingga di tingkat akar rumput.

6.4. Rekomendasi Strategis

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan dan lintas OPD terkait, maka direkomendasikan:

1. Penguatan Kebijakan Inklusif Berbasis Multikulturalisme

- Revisi dan penguatan regulasi kebudayaan agar lebih inklusif terhadap budaya pendatang.
- Integrasi prinsip multikulturalisme ke dalam RPJMD, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK), dan dokumen perencanaan kota lainnya.
- Mendorong kolaborasi antar budaya melalui *Festival Interkultural*, *Forum Budaya Warga* dan *Dialog Komunitas* berbasis kampung.

2. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Literasi Toleransi

- Implementasi kurikulum muatan lokal tentang budaya dan toleransi mulai dari PAUD hingga SMA.
- Pelibatan kampus dan sekolah dalam *program “Sinau Budaya dan Pancasila”* di tiap kelurahan.
- Kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan untuk membuat *modul pembelajaran kebhinekaan* di lingkungan pendidikan formal dan nonformal.

3. Fasilitasi Ruang Interaksi Budaya yang Berkeadilan

- Penataan ulang ruang publik agar bisa dimanfaatkan untuk aktivitas budaya lintas komunitas, bukan hanya budaya dominan.
- Pengembangan *Kampung Budaya Inklusif* sebagai prototipe ruang hidup harmonis antara warga lokal dan pendatang.
- Optimalisasi fungsi Taman Budaya, galeri, balai RW, dan alun-alun untuk event-event interaktif warga multietnis.

4. Pencegahan dan Penanganan Konflik Budaya Berbasis Komunitas

- Pembentukan *Tim Respons Sosial-Budaya* tingkat kecamatan/kelurahan yang terdiri dari tokoh adat, tokoh lintas iman, akademisi, dan pemuda.
- Pelatihan mediasi dan resolusi konflik budaya untuk RT/RW, satpol PP, lurah, dan karang taruna.

- Sistem “early warning” berbasis media sosial untuk mendeteksi potensi intoleransi dan gesekan etnis/agama.

5. Revitalisasi Kelembagaan Budaya Lokal dan Keterlibatan Komunitas Pemandang

- Revitalisasi fungsi Kraton sebagai *mediator budaya* dan penjaga etika hidup multikultural.
- Keterlibatan aktif komunitas pendatang dalam perencanaan dan pelaksanaan event budaya kota.
- Penguatan peran FKUB, kampus, dan komunitas mahasiswa daerah untuk mendukung *interaksi lintas identitas* yang setara.

6. Penyusunan Indikator Kinerja Interaksi Budaya

- Menyusun indikator kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur harmonisasi budaya, partisipasi warga dalam event budaya, dan persepsi antar kelompok.
- Evaluasi tahunan terhadap dampak program kebudayaan terhadap kohesi sosial dan ketahanan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Resmi dan Peraturan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2024.
Profil Perkembangan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2020.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.

Buku, Jurnal, Artikel

- Ahmad Shofiyuddin Ichsan (2018). "Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)". *Al-Adyaan: Jurnal Sosial dan Agama*, Vol. 5, No. 2.
- Bambang Hidayana (1998). "Pembauran Identitas Etnik di Kalangan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada". *Humaniora*, No. 9.
- Dewi Novianti dan Sigit Tripambudi (2014). "Studi Fenomenologi: Tumbuhnya Prasangka Etnis di Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 12, Nomor 2.
- Farabi Fakhri (2015). "Kotabaru and the Housing Estate as Bulwark against the Indigenization of Colonial Java" dalam Freek Colombijn and Joost Coté. *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. Leiden: Brill.
- Hasbi Marwahid (2022). "Membangun Kembali Pariwisata Yogyakarta: Strategi dan Upaya Pemerintah Melalui Badan Tourisme (BATOUR) 1954-1959". *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 8 No 1.
- Kaffah Imanuddin MR Santosa, Frisiska Frisiska, Farrah Farrah, Sri Indrayanti, Wiranti Kusuma Hapsari (2024). "Akulturasi Budaya pada Corak Bangsa Mandalasana dalam Objek Wisata Keraton Yogyakarta". *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4, No. 1.
- Martiana Noviopy Rae Rato dan Rahadjeng Pulungsari Hadi (2024). "Bakpia: Perjalanan Akulturasi Cina-Indonesia dalam Makanan Khas Yogyakarta". *Multikultura*, Vol. 3, No. 3.
- Selo Soemardjan (2008). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Winda Ayu Putri (2024). "Proses Gentrifikasi Di Perkotaan Yogyakarta". *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan*, Vol. 4 No. 3.

Laman

Detik.com

Jejakkolonial.blogspot.com

Jogjakota.go.id

Kratonjogja.id